



PUTUSAN

Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo,
yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada
pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SOFYAN HASAN, S.TP.,M.M;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tgl lahir : 47 Tahun / 05 September 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Huntu Desa Modelomo Kecamatan
Tilamuta, Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
(Rutan/Polres Boalemo);
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli
2020 (Rutan/Lapas Boalemo);
3. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan
tanggal 31 Juli 2020 (Rutan/Lapas Boalemo);
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai
dengan tanggal 29 September 2020 (Rutan/Lapas Boalemo);
5. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Gorontalo sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29
Oktober 2020 (Rutan/Lapas Boalemo);
6. Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak
tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
(Rutan/Lapas Boalemo);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 1 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020 (Rutan/Lapas Boalemo);
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 (Rutan/Lapas Boalemo);

Terdakwa di tingkat pertama didampingi oleh : DR. Duke Arie Widagdo, SH.,MH, CLA.,CPCLE,CPLC., Ingrid Suryani Bawias, SH.,MH., Hasnia, S.HI.,MH,MA,CLA.,CPLC., Ifrianto S. Rahman, SH.,MH., Mohamad Fahmid Noho, SH, CPLC., Christiaan Armstrong Thijmen, SH.,MH., semuanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada LAW FIRM DUKU ARIE & ASSOCIATES, beralamat di Kantor bersama Jalan Beringin No. 346 Kelurahan Huang Botu Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo. Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: W20-U1/09/AT.03.06/VII/2020 tanggal 10 – 07 – 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebutlah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 21 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 20 November 2020 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDS – 02/BLMO/06/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang isi selengkapny adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

PRIMAIR:

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Halaman 2 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP., M.M. selaku Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo berdasarkan Surat Perintah Penugasan Bupati Boalemo Nomor 800/007/BKDD/II/2018 tanggal 11 Januari 2018 dan selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 821.21/82/BKD-DIKLAT/SK/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 secara bersama-sama dengan Saksi DANAR BATA, S.TP (penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 821.4/29/BKD-DIKLAT/SK/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, yaitu antara bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo di Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum* yaitu meminta sebagian anggaran Pekerjaan dalam Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 kepada kelompok tani sebagai penerima manfaat/pelaksana kegiatan dan menggunakan tidak sesuai peruntukannya serta pekerjaan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan secara swakelola, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf g, huruf h dan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Pasal 11 ayat (4) huruf a dan ayat (5) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10.1/Permentan/ Rc.120/3/2018 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian, *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasiya itu* Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP., M.M dan saksi DANAR BATA, S.TP, yang

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 3 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yaitu sebesar Rp. 146.050.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo yang merupakan program pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dengan jumlah alokasi anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) TA. 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Nomor DPPA SKPD: 3.03.01.19.07.5.2 tanggal 02 Oktober 2018 adalah sebesar Rp.2.759.159.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Pelaksana Kegiatan / Penerima Manfaat adalah sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya di 14 (empat belas) lokasi dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap paket, dilaksanakan oleh:
 1. Kelompok Tani Berkat di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/56/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Berkat Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
 2. Kelompok Tani Cahaya Baru di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/55/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Cahaya Baru Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Halaman 4 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



3. Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/65/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Mananggu Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
4. Kelompok Tani Mekar Wangi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/54/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Mekar Wangi Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
5. Kelompok Tani Jaya Makmur di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/52/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Jaya Makmur Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
6. Kelompok Tani Melati III di Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/62/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Melati III Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
7. Kelompok Tani Melati V di Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/65/SPK/DISTAN-PSP-D AK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Melati V Tentang Pelaksanaan Kegiatan

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 5 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

8. Kelompok Tani Maju Bersama di Desa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/64/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Maju Bersama Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
9. Kelompok Tani Sri Tani I di Desa Bongo IV Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/60/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Sri Tani I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
10. Kelompok Tani Karya Bersama di Desa Permata Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/58/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Karya Bersama Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
11. Kelompok Tani Ingin Hidup III di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/63/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Ingin Hidup III Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
12. Kelompok Tani Cipta Karya I di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Pertanian Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/57/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 6 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Cipta Karya I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

13. Kelompok Tani Perintis II di Desa Rejonegoro Kecamatan Paguyaman Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/59/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Perintis II Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

14. Kelompok Tani Moropoga Jaya I di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/61/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Moropoga Jaya I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018.

b. Pembangunan Embung dilaksanakan di 6 (enam) lokasi dengan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tiap paket, dilaksanakan oleh:

1. Kelompok Tani Sumber Agung di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/43/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Sumber Agung Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

2. Kelompok Tani Merta Sari II di Desa Tri Rukun Wonosari Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/44/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Merta Sari II Tentang Pelaksanaan Kegiatan

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 7 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

3. Kelompok Darma Bakti I di Desa Bualo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/45/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Darma Bakti I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
 4. Kelompok Jurang Asih I di Desa Bualo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/46/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Jurang Asih I Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
 5. Kelompok Tani Maju Bersama di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/47/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Maju Bersama Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
 6. Kelompok Tani Mandiri III di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/48/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Mandiri III Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- c. Pembangunan Dam Parit dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tiap paket, dilaksanakan oleh:

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Tani Iloheluma IV di Desa Mutiara Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/50/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Iloheluma IV Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dam Parit melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
 2. Kelompok Tani Iloponu di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/51/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Iloponu Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dam Parit melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
 3. Kelompok Tani Mufakat di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/49/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Mufakat Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dam Parit melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo TA. 2018 dilaksanakan melalui swakelola padat karya yaitu dilaksanakan oleh Kelompok Tani maupun Balai Penyuluh Pertanian(BPP) sebagai penerima manfaat;
 - Bahwa mekanisme pencairan anggaran Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo TA. 2018, dengan cara ditransfer ke rekening bank milik masing-masing kelompok tani, yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 30% dan tahap III 30% dari nilai anggaran;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 9 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jangka waktu keseluruhan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo TA. 2018, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 12 November 2018 dan dilakukan Addendum perpanjangan waktu akibat adanya keterlambatan transfer dana dari Kementerian Pertanian ke Kas Daerah sehingga jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang menjadi tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP, MM. memerintahkan kepada Saksi DANAR BATA, S.TP, untuk meminta dan menerima uang dari para kelompok tani sebesar 10 % - 15 % dari anggaran Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo TA. 2018;
- Bahwa sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018, diadakan rapat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo yang dipimpin oleh Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP, MM selaku PLT.Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dan dihadiri oleh Saksi DANAR BATA, S.TP, para Ketua Kelompok Tani beserta Bendahara Kelompok Tani sebagai penerima manfaat, Saksi FIKRYANTO DJIBU selaku Fasilitator, Saksi HANDRYADI selaku Kepala Bidang Penyediaan Sarana dan Prasana Pertanian yang juga merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISMET LIHAWA selaku Ketua Tim Teknis, Saksi RUSYONO SALIKO selaku Anggota Tim Teknis serta beberapa pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP., M.M dalam rapat tersebut menyampaikan kepada Kelompok Tani agar sebagian pekerjaan dikerjakan oleh Saksi FIKRYANTO DJIBU;
- Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa Sofyan Hasan, S.TP., M.M., selaku PLT.Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo juga meminta uangyang berasal dari anggaran pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo TA. 2018, kepada para kelompok tani sebagai penerima manfaat atau pelaksana kegiatan;

- Bahwa setelah selesai rapat para Ketua Kelompok Tanimenemui Saksi DANAR BATA, S.TP di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, dan Saksi DANAR BATA, S.TP menyampaikan kepada para ketua kelompok tani untuk memenuhi permintaan uang Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP., M.M., selaku PLT.Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran pekerjaan dan diserahkan setelah pencairan tahap III kepada Saksi DANAR BATA, S.TP;
- Bahwa setelah melakukan pencairan anggaran tahap I,II dan III, beberapa ketua kelompok tani yang mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air dan Perlengkapannya, kemudian menyerahkan uang kepada Saksi FIKRIYANTO DJIBU untuk biaya pengeboran, pembelian pipa, pembuatan kusen pintu, pembelian mesin dan pembelian selang distribusi air, dengan rincian sebagai berikut:

N O	Jenis Pekerjaan	Penerima Manfaat	Jumlah Uang (Rp.)
1	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya	1.Kelompok Tani Berkat	17.000.000,00
		2. Kelompok Tani Cahaya Baru	9.500.000,00
		3. Kelompok Tani Mekar Wangi	60.000.000,00
		4. Kelompok Tani Jaya Makmur	50.000.000,00
		5. Kelompok Tani Melati III	21.200.000,00
		6. Kelompok Tani Melati V	21.200.000,00
		7. Kelompok Tani Maju Bersama	56.170.000,00
		8. Kelompok Tani Sri Tani I	57.000.000,00

Paraf	HK	HA.I	HA.II



	9. Kelompok Tani Karya Bersama	18.000.000,00
	10. BPP Kec. Mananggu	100.000.000,00
	11. Kelompok Tani Cipta Karya I	18.500.000,00
	12. Kelompok Tani Perintis II	21.200.000,00
	Jumlah	449.770.000,00

- Bahwa Saksi FIKRYANTO DJIBU menyerahkan uang biaya Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya sebesar Rp. 37.550.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP, MM, melalui Saksi DANAR BATA, S.TP;
- Bahwa setelah para ketua kelompok tani melakukan pencairan anggaran tahap III Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo TA. 2018, kemudian sesuai dengan permintaan Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP., M.M., selaku PLT.Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo pada rapat sebelumnya, maka para ketua kelompok tani menyerahkan uang kepada Saksi DANAR BATA, S.TP, yaitu sebagai berikut:

NO	Jenis Pekerjaan	Kelompok Tani	Jumlah Uang (Rp.)			
A.	Pembangunan	1. Berkat	5.000.000,00			
	Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya	2. Cahaya Baru	5.000.000,00			
		3. Mekar Wangi	4.000.000,00			
		4. Jaya Makmur	4.000.000,00			
		5. Melati III	4.000.000,00			
		6. Melati V	4.000.000,00			
		7. Maju Bersama	5.000.000,00			
		8. Sri Tani I	4.000.000,00			
		9. Karya Bersama	7.500.000,00			
		10. Ingin Hidup III	4.000.000,00			
		11. Cipta Karya I	8.000.000,00			
		12. Perintis II	4.000.000,00			
B	Pembangunan Embung	1.	10.000.000,00			
		Sumber Agung				
		2.	5.000.000,00			
		Merta Sari II				
			HK	HA.I	HA.II	
			Paraf			



		3.	5.000.000,00
		Darma Bakti I	
		4.	5.000.000,00
		Jurang Asih I	
C	Pembangunan Dam	1. Iloheluma IV	10.000.000,00
	Parit	2. Iloponu	10.000.000,00
		3. Mufakat	5.000.000,00
	Jumlah		108.500.000,00

- Bahwa 19 (sembilan belas) kelompok tani tersebut di atas menyerahkan uang kepada Saksi DANAR BATA, S.TP, di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, kecuali Kelompok Tani Iloponu yang menyerahkannya di rumah Saksi DANAR BATA, S.TP;
- Bahwa setelah Saksi DANAR BATA, S.TP menerima seluruh uang yang diserahkan oleh para kelompok tani sebesar Rp. 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi DANAR BATA melaporkan kepada Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP.,MM, selanjutnya Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP.,MM, memerintahkan Saksi DANAR BATA, S.TP untuk membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pegawai yang namanya tercantum dalam daftar yang diserahkan oleh Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP.,MM;
- Bahwa uang sebesar Rp. 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh 19 (sembilan belas) kelompok tani kepada Saksi DANAR BATA, S.TP merupakan anggaran untuk 19 (sembilan belas) Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 dan uang sebesar Rp. 37.550.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh FIKRYANTO DJIBU kepada SOFYAN HASAN, S.TP, MM. melalui DANAR BATA, S.TP merupakan anggaran pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa uang sebesar Rp. 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 37.550.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), telah digunakan tidak sesuai peruntukannya

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



oleh Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP, MM bersama-sama Saksi DANAR BATA, S.TP, sehingga perbuatan Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP, MM bersama-sama Saksi DANAR BATA, S.TP, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 146.050.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP., M.M meminta sebagian anggaran Pekerjaan dalam Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 kepada kelompok tani sebagai penerima manfaat/pelaksana kegiatan yang bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf g, huruf h dan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Ketentuan Pasal 6 adalah sebagai berikut:

"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;"

Pasal 115 ayat (1) adalah: K/I/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa";

- Bahwa perbuatan Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP., M.M tidak melaksanakan sepenuhnya Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 secara swakelola bertentangan dengan Pasal 11 ayat (4) huruf a dan ayat (5) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10.1/Permentan/

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rc.120/3/2018 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian;

Pasal 11 Ayat (4)

Kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten / kota dibiayai dari DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1):

- huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Swakelola Padat Karya (Cash for Work); dan;
- huruf c dan d dilaksanakan melalui pemilihan barang / jasa atau kontraktual;

Pasal 12 Ayat (2)

Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian melakukan:

- pembentukan fasilitator;
- rencana seleksi Calon Penerima Manfaat dan Calon Lokasi (CP/CL);
- penyaluran;
- pembinaan; dan
- pelaporan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP., M.M. selaku Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo berdasarkan Surat Perintah Penugasan Bupati Boalemo Nomor 800/007/BKDD/II/2018 tanggal 11 Januari 2018 dan selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 821.21/82/BKD-DIKLAT/SK/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 secara bersama-sama dengan Saksi DANAR BATA, S.TP (penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 15 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 821.4/29/BKD-DIKLAT/SK/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, yaitu antara bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo di Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah *telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP.,MM, bersama-sama Saksi DANAR BATA, S.TP, *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya* itu Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP.,MM, selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo/Pengguna Anggaran telah meminta sebagian anggaran Pekerjaan dalam Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 kepada kelompok tani sebagai penerima manfaat/pelaksana kegiatan dan menggunakan tidak sesuai peruntukannya serta pekerjaan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan secara swakelola, *yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* yaitu sebesar Rp. 146.050.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo yang merupakan program pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dengan jumlah alokasi anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD)

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 16 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Nomor DPPA SKPD: 3.03.01.19.07.5.2 tanggal 02 Oktober 2018 adalah sebesar Rp.2.759.159.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa Pelaksana Kegiatan / Penerima Manfaat adalah sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya di 14 (empat belas) lokasi dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap paket, dilaksanakan oleh:
 1. Kelompok Tani Berkat di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/56/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Berkat Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
 2. Kelompok Tani Cahaya Baru di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/55/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Cahaya Baru Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
 3. Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/65/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Mananggu Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
 4. Kelompok Tani Mekar Wangi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/54/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 17 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



- 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Mekar Wangi Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
5. Kelompok Tani Jaya Makmur di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/52/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Jaya Makmur Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
6. Kelompok Tani Melati III di Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/62/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Melati III Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
7. Kelompok Tani Melati V di Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/65/SPK/DISTAN-PSP-D AK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Melati V Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
8. Kelompok Tani Maju Bersama di Desa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/64/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Maju Bersama Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
9. Kelompok Tani Sri Tani I di Desa Bongo IV Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor :

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



520/60/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Sri Tani I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

10. Kelompok Tani Karya Bersama di Desa Permata Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/58/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Karya Bersama Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

11. Kelompok Tani Ingin Hidup III di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/63/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Ingin Hidup III Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

12. Kelompok Tani Cipta Karya I di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Pertanian Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/57/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Cipta Karya I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

13. Kelompok Tani Perintis II di Desa Rejonegoro Kecamatan Paguyaman Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/59/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Perintis II Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

14. Kelompok Tani Moropoga Jaya I di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/61/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Moropoga Jaya I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018.

b. Pembangunan Embung dilaksanakan di 6 (enam) lokasi dengan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tiap paket, dilaksanakan oleh :

1. Kelompok Tani Sumber Agung di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/43/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Sumber Agung Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

2. Kelompok Tani Merta Sari II di Desa Tri Rukun Wonosari Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/44/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Merta Sari II Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

3. Kelompok Darma Bakti I di Desa Bualo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/45/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VIII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Darma Bakti I Tentang Pelaksanaan Kegiatan

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 20 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

4. Kelompok Jurang Asih I di Desa Bualo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/46/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Jurang Asih I Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

5. Kelompok Tani Maju Bersama di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/47/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Maju Bersama Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

6. Kelompok Tani Mandiri III di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/48/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Mandiri III Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018.

c. Pembangunan Dam Parit dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tiap paket, dilaksanakan oleh :

1. Kelompok Tani Iloheluma IV di Desa Mutiara Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/50/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Iloheluma IV Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dam Parit melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kelompok Tani Iloponu di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/51/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Iloponu Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dam Parit melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
 3. Kelompok Tani Mufakat di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/49/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Mufakat Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dam Parit melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo TA. 2018 dilaksanakan melalui swakelola padat karya yaitu dilaksanakan oleh Kelompok Tani maupun Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai penerima manfaat;
 - Bahwa mekanisme pencairan anggaran Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo TA. 2018, dengan cara ditransfer ke rekening bank milik masing-masing kelompok tani, yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 30% dan tahap III 30% dari nilai anggaran;
 - Bahwa jangka waktu keseluruhan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo TA. 2018, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 12 November 2018 dan dilakukan Addendum perpanjangan waktu akibat adanya keterlambatan transfer dana dari Kementerian Pertanian ke Kas Daerah sehingga jangka waktu

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 22 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



pelaksanaan pekerjaan diperpanjang menjadi tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;

- Bahwa pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP, MM sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo/Pengguna Anggaran dalam pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018, adapun tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
2. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
3. Menetapkan PPK;
4. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
5. Menetapkan Panitia/pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
6. Menetapkan:
 - a. pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - b. pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
8. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyelesaikan perselisihan antara PejabatPembuatKomitmen (PPK) dengan Unit LayananPengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
10. Mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan, PA dapat:

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



- menetapkan tim teknis; dan/atau;
- pada menetapkan tim juri / tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui sayembara kontes. dalam hal pengadaan barang/jasa;
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan dokumen anggaran atau beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP, MM. memerintahkan kepada Saksi DANAR BATA, S.TP, untuk meminta dan menerima uang dari para kelompok tani sebesar 10 % - 15 % dari anggaran Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo TA. 2018;
- Bahwa sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018, diadakan rapat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo yang dipimpin oleh Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP, MM selaku PLT.Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dan dihadiri oleh Saksi DANAR BATA, S.TP, para Ketua Kelompok Tani beserta Bendahara Kelompok Tani sebagai penerima manfaat, Saksi FIKRYANTO DJIBU selaku Fasilitator, Saksi HANDRYADI selaku Kepala Bidang Penyediaan Sarana dan Prasana Pertanian yang juga merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISMET LIHAWA selaku Ketua Tim Teknis, Saksi RUSYONO SALIKO selaku Anggota Tim Teknis serta beberapa pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP., M.M dalam rapat tersebut menyampaikan kepada Kelompok Tani agar sebagian pekerjaan dikerjakan oleh Saksi FIKRYANTO DJIBU;
- Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa Sofyan Hasan, S.TP., M.M., selaku PLT.Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo juga meminta uang yang berasal dari anggaran pekerjaan Pembangunan Irigasi Air

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo TA. 2018, kepada para kelompok tani sebagai penerima manfaat atau pelaksana kegiatan;

- Bahwa setelah selesai rapat para Ketua Kelompok Tani menemui Saksi DANAR BATA, S.TP di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, dan Saksi DANAR BATA, S.TP menyampaikan kepada para ketua kelompok tani untuk memenuhi permintaan uang Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP., M.M., selaku PLT.Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran pekerjaan dan diserahkan setelah pencairan tahap III kepada Saksi DANAR BATA, S.TP;
- Bahwa setelah melakukan pencairan anggaran tahap I,II dan III, beberapa ketua kelompok tani yang mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air dan Perlengkapannya, kemudian menyerahkan uang kepada Saksi FIKRIYANTO DJIBU untuk biaya pengeboran, pembelian pipa, pembuatan kusen pintu, pembelian mesin dan pembelian selang distribusi air, dengan rincian sebagai berikut :

N O	Jenis Pekerjaan	Penerima Manfaat	Jumlah Uang (Rp.)
1	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya	1.Kelompok Tani Berkat	17.000.000,00
		2. Kelompok Tani Cahaya Baru	9.500.000,00
		3. Kelompok Tani Mekar Wangi	60.000.000,00
		4. Kelompok Tani Jaya Makmur	50.000.000,00
		5. Kelompok Tani Melati III	21.200.000,00
		6. Kelompok Tani Melati V	21.200.000,00
		7.Kelompok Tani Maju Bersama	56.170.000,00
		8. Kelompok Tani Sri Tani I	57.000.000,00

Paraf	HK	HA.I	HA.II



		0
	9. Kelompok Tani Karya Bersama	18.000.000,00
	10. BPP Kec. Mananggu	0
	11. Kelompok Tani Cipta Karya I	100.000.000,00
	12. Kelompok Tani Perintis II	18.500.000,00
		0
		21.200.000,00
		0
	Jumlah	449.770.000,00

- Bahwa Saksi FIKRYANTO DJIBU menyerahkan uang biaya Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya sebesar Rp. 37.550.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP, MM, melalui Saksi DANAR BATA, S.TP;
- Bahwa setelah para ketua kelompok tani melakukan pencairan anggaran tahap III Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo TA. 2018, kemudian sesuai dengan permintaan Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP., M.M., selaku PLT.Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo pada rapat sebelumnya, maka para ketua kelompok tani menyerahkan uang kepada Saksi DANAR BATA, S.TP, yaitu sebagai berikut :

NO	Jenis Pekerjaan	Kelompok Tani	Jumlah Uang (Rp.)
A.	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya	1. Berkat	5.000.000,00
		2. Cahaya Baru	5.000.000,00
		3. Mekar Wangi	4.000.000,00
		4. Jaya Makmur	4.000.000,00
		5. Melati III	4.000.000,00
		6. Melati V	4.000.000,00
		7. Maju Bersama	5.000.000,00
		8. Sri Tani I	4.000.000,00
		9. Karya Bersama	7.500.000,00
		10. Ingin Hidup III	4.000.000,00
		11. Cipta Karya I	8.000.000,00
		12. Perintis II	4.000.000,00
B	Pembangunan Embung	1. Sumber Agung	10.000.000,00
		2.	5.000.000,00

Paraf	HK	HA.I	HA.II



		Merta Sari II	
		3.	5.000.000,00
		Darma Bakti I	
		4.	5.000.000,00
		Jurang Asih I	
C	Pembangunan Dam	1. Iloheluma IV	10.000.000,00
	Parit	4. Iloponu	10.000.000,00
		5. Mufakat	5.000.000,00
		Jumlah	108.500.000,00

- Bahwa 19 (sembilan belas) kelompok tani tersebut di atas menyerahkan uang kepada Saksi DANAR BATA, S.TP, di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, kecuali Kelompok Tani Iloponu yang menyerahkannya di rumah Saksi DANAR BATA, S.TP;
- Bahwa setelah Saksi DANAR BATA, S.TP menerima seluruh uang yang diserahkan oleh para kelompok tani sebesar Rp. 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi DANAR BATA melaporkan kepada Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP.,MM, selanjutnya Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP.,MM, memerintahkan Saksi DANAR BATA, S.TP untuk membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pegawai yang namanya tercantum dalam daftar yang diserahkan oleh Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP.,MM;
- Bahwa uang sebesar Rp. 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang serahkan oleh 19 (sembilan belas) kelompok tani kepada Saksi DANAR BATA, S.TP merupakan anggaran untuk 19 (sembilan belas) Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 dan uang sebesar Rp. 37.550.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh FIKRYANTO DJIBU kepada SOFYAN HASAN, S.TP, MM. melalui DANAR BATA, S.TP merupakan anggaran pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya Tahun Anggaran 2018;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 37.550.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), telah digunakan tidak sesuai peruntukannya oleh Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP, MM bersama-sama Saksi DANAR BATA, S.TP, sehingga perbuatan Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP, MM selaku PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo/Pengguna Anggaran bersama-sama Saksi DANAR BATA, S.TP, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 146.050.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP., M.M. selaku Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo berdasarkan Surat Perintah Penugasan Bupati Boalemo Nomor 800/007/BKDD/II/2018 tanggal 11 Januari 2018 dan selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 821.21/82/BKD-DIKLAT/SK/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 secara bersama-sama dengan Saksi DANAR BATA, S.TP (penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 821.4/29/BKD-DIKLAT/SK/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, yaitu antara bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo di Desa Pangli Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 28 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah *menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo yang merupakan program pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dengan jumlah alokasi anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) TA. 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Nomor DPPA SKPD: 3.03.01.19.07.5.2 tanggal 02 Oktober 2018 adalah sebesar Rp.2.759.159.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa Pelaksana Kegiatan / Penerima Manfaat adalah sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya di 14 (empat belas) lokasi dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap paket, dilaksanakan oleh:
 1. Kelompok Tani Berkat di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/56/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Berkat Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
 2. Kelompok Tani Cahaya Baru di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/55/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Cahaya Baru Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

3. Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/65/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Mananggu Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
4. Kelompok Tani Mekar Wangi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/54/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Mekar Wangi Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
5. Kelompok Tani Jaya Makmur di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/52/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Jaya Makmur Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
6. Kelompok Tani Melati III di Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/62/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Melati III Tentang Pelaksanaan Kegiatan

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 30 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

7. Kelompok Tani Melati V di Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/65/SPK/DISTAN-PSP-D AK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Melati V Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
8. Kelompok Tani Maju Bersama di Desa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/64/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Maju Bersama Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
9. Kelompok Tani Sri Tani I di Desa Bongo IV Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/60/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Sri Tani I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
10. Kelompok Tani Karya Bersama di Desa Permata Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/58/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Karya Bersama Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
11. Kelompok Tani Ingin Hidup III di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Nomor : 520/63/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Ingin Hidup III Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

12. Kelompok Tani Cipta Karya I di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Pertanian Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/57/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Cipta Karya I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

13. Kelompok Tani Perintis II di Desa Rejonegoro Kecamatan Paguyaman Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/59/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Perintis II Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

14. Kelompok Tani Moropoga Jaya I di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/61/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Moropoga Jaya I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

b. Pembangunan Embung dilaksanakan di 6 (enam) lokasi dengan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tiap paket, dilaksanakan oleh:

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 32 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kelompok Tani Sumber Agung di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/43/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Sumber Agung Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
2. Kelompok Tani Merta Sari II di Desa Tri Rukun Wonosari Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/44/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Merta Sari II Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
3. Kelompok Darma Bakti I di Desa Bualo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/45/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Darma Bakti I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
4. Kelompok Jurang Asih I di Desa Bualo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/46/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Jurang Asih I Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
5. Kelompok Tani Maju Bersama di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/47/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Maju Bersama Tentang

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 33 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

6. Kelompok Tani Mandiri III di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilmuta Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/48/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Mandiri III Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

c. Pembangunan Dam Parit dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tiap paket, dilaksanakan oleh:

1. Kelompok Tani Iloheluma IV di Desa Mutiara Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/50/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Iloheluma IV Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dam Parit melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

2. Kelompok Tani Iloponu di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/51/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Iloponu Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dam Parit melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

3. Kelompok Tani Mufakat di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/49/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Mufakat Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dam Parit melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 34 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



- Bahwa mekanisme pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo TA. 2018 dilaksanakan melalui swakelola padat karya yaitu dilaksanakan oleh Kelompok Tani maupun Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai penerima manfaat;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo TA. 2018, dengan cara ditransfer ke rekening bank milik masing-masing kelompok tani, yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 30% dan tahap III 30% dari nilai anggaran;
- Bahwa jangka waktu keseluruhan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo TA. 2018, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 12 November 2018 dan dilakukan Addendum perpanjangan waktu akibat adanya keterlambatan transfer dana dari Kementerian Pertanian ke Kas Daerah sehingga jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang menjadi tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP, MM sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo/Pengguna Anggaran dalam pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018, adapun tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) adalah sebagai berikut:
 1. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 2. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 3. Menetapkan PPK;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



4. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
5. Menetapkan Panitia/pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
6. Menetapkan :
 - a. pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - b. pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
8. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyelesaikan perselisihan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
10. Mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan, PA dapat:

- menetapkan tim teknis; dan/atau;
- pada menetapkan tim juri / tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui sayembara kontes. dalam hal pengadaan barang/jasa;
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan dokumen anggaran atau beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP, MM. memerintahkan kepada Saksi DANAR BATA, S.TP, untuk meminta dan menerima uang dari para kelompok tani sebesar 10 % - 15 % dari anggaran Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo TA. 2018;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



- Bahwa sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018, diadakan rapat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo yang dipimpin oleh Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP, MM selaku PLT.Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dan dihadiri oleh Saksi DANAR BATA, S.TP, para Ketua Kelompok Tani beserta Bendahara Kelompok Tani sebagai penerima manfaat, Saksi FIKRYANTO DJIBU selaku Fasilitator, Saksi HANDRYADI selaku Kepala Bidang Penyediaan Sarana dan Prasana Pertanian yang juga merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi ISMET LIHAWA selaku Ketua Tim Teknis, Saksi RUSYONO SALIKO selaku Anggota Tim Teknis serta beberapa pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP., M.M dalam rapat tersebut menyampaikan kepada Kelompok Tani agar sebagian pekerjaan dikerjakan oleh Saksi FIKRYANTO DJIBU;
- Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa Sofyan Hasan, S.TP., M.M., selaku PLT.Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo juga meminta uang yang berasal dari anggaran pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo TA. 2018, kepada para kelompok tani sebagai penerima manfaat atau pelaksana kegiatan;
- Bahwa setelah selesai rapat para Ketua Kelompok Tani menemui Saksi DANAR BATA, S.TP di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, dan Saksi DANAR BATA, S.TP menyampaikan kepada para ketua kelompok tani untuk memenuhi permintaan uang Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP., M.M., selaku PLT.Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran pekerjaan dan diserahkan setelah pencairan tahap III kepada Saksi DANAR BATA, S.TP;
- Bahwa setelah para ketua kelompok tani melakukan pencairan anggaran tahap III Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo TA. 2018, kemudian sesuai dengan permintaan Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP., M.M., selaku PLT.Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo pada rapat sebelumnya, maka para ketua kelompok tani menyerahkan uang kepada Saksi DANAR BATA, S.TP, yaitu sebagai berikut :

NO	Jenis Pekerjaan	Kelompok Tani	Jumlah Uang (Rp.)
A.	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya	1. Berkat	5.000.000,00
		2. Cahaya Baru	5.000.000,00
		3. Mekar Wangi	4.000.000,00
		4. Jaya Makmur	4.000.000,00
		5. Melati III	4.000.000,00
		6. Melati V	4.000.000,00
		7. Maju Bersama	5.000.000,00
		8. Sri Tani I	4.000.000,00
		9. Karya Bersama	7.500.000,00
		10. Ingin Hidup III	4.000.000,00
		11. Cipta Karya I	8.000.000,00
		12. Perintis II	4.000.000,00
B	Pembangunan Embung	1. Sumber Agung	10.000.000,00
		2. Merta Sari II	5.000.000,00
		3. Darma Bakti I	5.000.000,00
		4. Jurang Asih I	5.000.000,00
		1. Iloheluma IV	10.000.000,00
C	Pembangunan Dam Parit	6. Iloponu	10.000.000,00
		7. Mufakat	5.000.000,00
		Jumlah	

- Bahwa 19 (sembilan belas) kelompok tani tersebut di atas menyerahkan uang kepada Saksi DANAR BATA, S.TP, di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, kecuali Kelompok Tani Iloponu yang menyerahkannya di rumah Saksi DANAR BATA, S.TP;
- Bahwa 19 (sembilan belas) kelompok tani yang diwakili oleh masing-masing ketua dan bendahara secara terpaksa memberikan uang

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Halaman 38 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas kepada Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP.,MM melalui Saksi DANAR BATA,S.TP;

- Bahwa setelah Saksi DANAR BATA, S.TP menerima seluruh uang yang diserahkan oleh para kelompok tani sebesar Rp. 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi DANAR BATA melaporkan kepada Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP.,MM, selanjutnya Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP.,MM, memerintahkan Saksi DANAR BATA, S.TP untuk membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pegawai yang namanya tercantum dalam daftar yang diserahkan oleh Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP.,MM;
- Bahwa uang sebesar Rp. 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang serahkan oleh 19 (sembilan belas) kelompok tani kepada Saksi DANAR BATA, S.TP merupakan anggaran untuk 19 (sembilan belas) Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. PDS - 02/ BLMO / 06 / 2020 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP., M.M telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 39 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP., M.M. dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 126.550.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/43/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Sumber Agung Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 2) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/44/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Merta Sari II Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 3) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/45/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Darma Bakti I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 4) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/46/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Jurang Asih I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 40 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/47/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Maju Bersama Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 6) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/48/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Mandiri III Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 7) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/49/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Mufakat Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dam Parit melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 8) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/50/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Iloheluma IV Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dam Parit melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 9) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/51/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Iloponu Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dam Parit melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 10) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/52/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Jaya Makmur Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 11) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/54/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Mekar Wangi Tentang

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 41 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

- 12) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/55/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Cahaya Baru Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 13) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/56/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Berkat Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 14) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/57/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Cipta Karya I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 15) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/58/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Karya Bersama Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 16) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/59/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Perintis II Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 17) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/60/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Sri Tani I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 18) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/61/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Moropoga Jaya I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

- 19) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/62/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Melati III Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 20) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/63/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Ingin Hidup III Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 21) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/64/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Maju Bersama Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 22) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/65/SPK/DISTAN-PSP-D AK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Melati V Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 23) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/65/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Mananggu Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 24) (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (Dak) Bulan Agustus 2018;
- 25) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung jawaban Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Bulan Oktober 2018;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 43 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Cipta Karya I Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman;
- 27) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Maju Bersama Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman;
- 28) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Moropoga Jaya I Desa Saripi Kec. Paguyaman;
- 29) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Melati V Desa Mustika Kec. Paguyaman;
- 30) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Ingin Hidup III Desa Wonggahu Kec. Paguyaman;
- 31) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Perintis II Desa Rejonegoro Kec. Paguyaman;
- 32) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Melati III Desa Mustika Kec. Paguyaman;
- 33) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Karya Bersama Desa Permata Kec. Paguyaman;
- 34) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Sri Tani I Desa Bongo IV Kec. Paguyaman;
- 35) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Mekar Wangi Desa Mekar Jaya Kec. Wonosari;
- 36) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Tri Rukun Kec. Wonosari;

Paraf	HK	HA.I	HA.II



- 37) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Berkat Desa Buti Kec. Mananggu;
- 38) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Cahaya Baru Desa Mananggu Kec. Mananggu;
- 39) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 BPP Mananggu Desa Pontolo Kec. Mananggu;
- 40) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Embung TA. 2018 Kelompok Tani Maju Bersama Desa Pentadu Timur Kec. Tilamuta;
- 41) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Embung TA. 2018 Kelompok Tani Mandiri III Desa Piloliyanga Kec. Tilamuta;
- 42) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Embung TA. 2018 Kelompok Tani Merta Sari II Desa Tri Rukun Kec. Wonosari;
- 43) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Embung TA. 2018 Kelompok Tani Sumber Agung Desa Jatimulya Kec. Wonosari;
- 44) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Embung TA. 2018 Kelompok Tani Jurang Asih I Desa Bualo Kec. Paguyaman;
- 45) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Embung TA. 2018 Kelompok Tani Darma Bakti I Desa Bualo Kec. Paguyaman;
- 46) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Dam Parit TA. 2018 Kelompok Tani Iloponu Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari;
- 47) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Dam Parit TA. 2018 Kelompok Tani Mufakat Desa Mananggu Kec. Mananggu;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



48) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Dam Parit TA. 2018 Kelompok Tani Iloheluma IV Desa Mutiara Kec. Paguyaman;

49) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Mekar Wangi Tahap II Nomor : 11893 / BKAD / SP2D-LS/XI/2018 tanggal 22 November 2018, beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 414/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018;
- Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 16 November 2018;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 414/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018;
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 November 2018;
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 9094 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 15 November 2018;
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 9094 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 tanggal 15 November 2018;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 414/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 414/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018;
- Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 16 November 2018 bermaterai 6000;
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 414/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/414/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018;
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 16 November 2018;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 133/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 16 November 2018;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (total 70%);
- Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Mekar Wangi;
- 50) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Mekar Wangi Tahap III Nomor : 14093 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018, beserta;
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 575/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Kwitansi Pembayaran Tahap III tanggal 17 Desember 2018;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 575/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 18 Desember 2018;
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10288 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018;
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10288 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 575/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 575/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Kwitansi Pembayaran Tahap III Tanggal 17 Desember 2018 bermaterai 6000;
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 575/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/575/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018;
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 184/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Cetakan Kode Billing;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 47 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Setoran Pajak No. Resi : 96263-03/2018/832848 tanggal 12 Desember 2018;
 - Tanda Terima Setoran Pajak No. Resi : 96263-03/2018/832847 tanggal 12 Desember 2018;
 - Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2018 Nomor : 003595/SSPD/06/1/2018 tanggal 12 Desember 2018;
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor : 003374/SKPD/06/4/2018 tahun 2018;
 - Foto kopi Slip Setoran tanggal 12 Desember 2018;
 - Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Mekar Wangi;
- 51) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Ingin Hidup III Tahap II Nomor : 11562 / BKAD / SP2D-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018, beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 399/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018;
 - Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 13 November 2018;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 399/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018;
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 13 November 2018;
 - Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 8769 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 9 November 2018;
 - Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 8769 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 tanggal 9 November 2018;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 399/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 399/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 13 November 2018;
 - Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 13 November 2018 bermaterai 6000;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 48 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 399/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/ /SPTB-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018;
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 13 November 2018;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 130/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 13 November 2018;
 - Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (total 70%);
 - Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Ingin Hidup III;
- 52) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Ingin Hidup III Tahap III Nomor : 14107 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018, beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 564/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap III tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 564/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10293 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
 - Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10293 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 564/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 49 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 564/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap III Tanggal 14 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
 - Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 564/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/564/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 172/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Rencana Usulan Kegiatan 30% ke 2 (Total 100%) (3 lembar);
 - Cetakan Kode Billing (1 lembar);
 - Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2018 Nomor : 003498/SSPD/06/1/2018 tanggal 10 Desember 2018 (1 lembar);
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor : 003290/SKPD/06/4/2018 tahun 2018 (1 lembar);
 - Surat Tanda Setoran No. 18 18412 tanggal 10 Desember 2018 (1 lembar);
 - Foto kopi Slip Setoran tanggal 10 Desember 2018 (1 lembar);
 - Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Ingin Hidup III (1 lembar).
- 53) Surat Perintah Pencairan Dana BPP Mananggu Desa Pontolo Tahap II Nomor : 14926 / BKAD / SP2D-LSXII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (1 lembar), beserta:
- Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 18 Desember 2018 (1 lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 587/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (1 lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 50 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
 - Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10393 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10393 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 587/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (10 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 587/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018: (2 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 18 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
 - Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 587/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/557/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 lembar);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 187/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 lembar);
 - Rencana Usulan Kegiatan 30% (tahap II 70%) (2 lembar);
 - Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Pajak) tanggal 18 Desember 2018 (1 lembar);
 - Cetakan Kode Billing (1 lembar);
 - Foto kopi buku rekening BPP Mananggu (1 lembar);
- 54) Surat Perintah Pencairan Dana BPP Mananggu Desa Pontolo Tahap III Nomor : 14964 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (1 lembar), beserta:
- Kwitansi Pembayaran Tahap III tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 51 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 1039/BKAD/SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10392/BKAD/SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 590/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (10 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 590/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 590/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III Tanggal 19 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 590/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/590/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 192/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Rencana Usulan Kegiatan 30% (Tahap III 100%) (2 lembar);
- Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2018 Nomor : 003794/SSPD/06/1/2018 tanggal 18 Desember 2018 (1 lembar);
- Foto Kopi Slip Setoran tanggal 18 Desember 2018 (1 lembar);
- Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Pajak) tanggal 18 Desember 2018 (1 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 52 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cetakan Kode Billing (1 lembar);
 - Foto Kopi Buku Rekening BPP Mananggu (1 lembar);
- 55) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Cipta Karya I Tahap II Nomor : 14092 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar), beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 561/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 561/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10282 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
 - Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10282 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 561/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 561/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 14 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
 - Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 561/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 53 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/561/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 169/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 70%) (3 lembar);
 - Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Cipta Karya I (1 lembar);
- 56) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Cipta Karya I Tahap III Nomor : 14893 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (1 lembar), beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 603/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap III tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
 - Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10399 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10399 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 603/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (10 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 603/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 54 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 603/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap III Tanggal 19 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
 - Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 603/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/603/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 198/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
 - Foto Kopi buku Rekening Kelompok Tani Cipta Karya I (1 lembar);
- 57) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Karya Bersama Tahap II Nomor : 14091 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar), beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 563/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 14 Desember 2018 1 lembar;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 561/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10283 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
 - Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10283 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 55 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 563/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 563/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 14 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
 - Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 563/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/563/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 171/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 70%) (3 lembar);
 - Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Karya Bersama (1 lembar);
- 58) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Karya Bersama Tahap III Nomor : 14891 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (1 lembar), beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 602/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap III tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
 - Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10398 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 56 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10398 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 602/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (10 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 602/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 602/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap III Tanggal 19 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
 - Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 602/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/602/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 199/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- 59) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Berkat Tahap II Nomor : 11492 / BKAD / SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 lembar), beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 389/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 09 November 2018 (1 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 09 November 2018 (1 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 09 November 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 57 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 389/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 9 November 2018 (1 lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 9 November 2018 (2 lembar);
 - Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 8693 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 (1 lembar);
 - Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 8693 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 (1 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 389/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 9 November 2018 (8 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 389/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 9 November 2018 (2 lembar);
 - Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 389/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 (2 lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/389/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 09 November 2018 (2 lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 09 November 2018 (2 lembar);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 125/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 09 November 2018 (2 lembar);
 - Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 70%) (3 lembar);
- 60) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Berkat Tahap III nomor : 14142/BKAD/SP2-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar), beserta :
- Surat perintah pencairan dana nomor : 14142/BKAD/SP2-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018.(1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 58 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :565/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Berkat Desa Buti Kec.Mananggu Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 565/Pertanian/SPP-LS/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu,A.Md , Fatria Ahmad dan Syaiful Biladali yang di paraf pada tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018. (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10297/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 10297/BKAD/SPD-LS/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:565/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor:565/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 565/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/565/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 59 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Nomor :173/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Rencana usulan kegiatan 30% (2 Lembar);
 - Tanda terima setoran pajak (MPN Billing) dengan No Resi :96265-02/2018/815811 sebesar Rp.76.500 (Tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), No Resi :96265-02/2018/815812 sebesar Rp.102.000 (seratus dua ribu rupiah), No Resi :96265-02/2018/815809 sebesar Rp.76.500 (Tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), dan No Resi : 96265-02/2018/815810 sebesar Rp.76.500 (Tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) (2 Lembar);
 - Surat setoran pajak daerah (SSPD) Tahun 2018 Nomor : 003169/SSPD/06/1/2018 tanggal 29 November 2018 (1 Lembar);
 - Fotokopi buku tabungan BRI BRITAMA atas nama Kelompok Tani Berkat (1 Lembar);
- 61) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Jaya Makmur Tahap II Nomor : 14137 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar), beserta:
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 14137 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
 - Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 562/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 562/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 60 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10284 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
 - Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10284 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 562/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 562/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 14 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
 - Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 562/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/562/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 168/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 70%) (3 lembar);
 - Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Jaya Makmu (1 lembar);
- 62) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Jaya Makmur Tahap III nomor : 15169/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 604/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 19 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Tri Rukun Kec.Wonosari Kab.Boalemo TA.2018 (SD-

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);

- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu,A.Md , Fatria Ahmad dan Syaiful Biladali yang di paraf pada tanggal 21 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 21 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10593/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 10593/BKAD/SPD-LS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:604/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor:604/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 604/Pertanian/SPM-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Tri Rukun Kec.Wonosari Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 604/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 21 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/604/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita acara pembayaran Nomor:218/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat setoran pajak daerah (SSPD) Tahun 2018 Nomor : 003356/SSPD/06/1/2018 tanggal 05 Desember 2018 (1 Lembar);
- 63) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Sri Tani I Tahap II Nomor : 14141 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar), beserta:
 - Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 560/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 560/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10281 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
 - Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10281 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 560/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 14 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
 - Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 560/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/560/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 63 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Nomor : 170/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 70%) (3 lembar);
 - Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Sri Tani I (1 lembar);
- 64) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Sri Tani I tahap III nomor : 15137/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :597/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 19 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Sri Tani Desa Bongo IV Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluha Juta Rupiah) tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 597/Pertanian/SPM-LS/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu,A.Md , Fatria Ahmad dan Syaiful Biladali yang di paraf pada tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10394/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 10394/BKAD/SPD-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:597/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (10 Lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor: 597/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 64 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Sri Tani Desa Bongo IV Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Lembar Kontrol Nomor SPP: 597/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/597/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor :193/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Rencana usulan kegiatan 30% (3 Lembar);
 - Tanda terima setoran pajak (MPN Billing) dengan No Resi :96263-02/2018/808484 sebesar Rp.598.500 (Lima ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (1 Lembar);
 - Cetakan kode billing dengan jumlah setoran sebesar Rp. 598.500 (Lima ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (1 Lembar);
 - Surat setoran pajak daerah (SSPD) Tahun 2018 Nomor : 004046/SSPD/06/1/2018 tanggal 29 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Nomor : 003810/SKPD/06/4/2018 tanggal 26 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Slip setoran dengan nomor 015.01.12.000000.1 (1 Lembar);
- 65) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Melati V Tahap II nomor : 11949/BKAD/SP2D-LS/XI/2018 tanggal 22 November 2018 (1 Lembar), beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :402/Pertanian/SPP-LS/XI/2018 tanggal SPP : 13 November 2018 (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran tahap II sebesar 70% pekerjaan DAM Parit Kelompok Tani Melati Desa Mustika Kec. Paguyaman Kab. Boalemo

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 65 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000
(Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 13 November 2018 (1 Lembar);

- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Fatria Ahmad dan Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 14 November 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:8768/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:8768/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:402/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (8 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor:402/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018) tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 402/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018, tanggal 13 November 2018 (1 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 402/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 yang diterima pada tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/402/SPM-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :127/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (3 Lembar);
- Buku Tabungan BRI BRITAMA No Rekening : 5151-01-033202-53-0 atas nama kelompok tani melati v (1 Lembar);

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Halaman 66 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



66) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Melati V Tahap III
Nomor : 14138 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018
(1 lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 nomor SPP : 571/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 571/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10290 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10290 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 571/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 571/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III Tanggal 14 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 571/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/571/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 67 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 178/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Rencana Usulan Kegiatan 30% ke 2 (total 100%) (3 lembar);
 - Cetakan Kode Billing nomor ID Billing 0181 2382 0991 136 (1 lembar);
 - Tanda Terima Pajak 548218203 tanggal 12 Desember 2018 (1 lembar);
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Nomor : 003312/SKPD/06/4/2018 (1 lembar);
 - Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2018 Nomor : 003528/SSPD/06/1/2018 tanggal 10 Desember 2018 (1 lembar);
 - Foto Kopi Slip Setoran tanggal 10 Desember 2018 (1 lembar);
 - Foto Kopi Buku Rekening Kelompok Tani Melati V (1 lembar);
- 67) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Perintis II Tahap II nomor : 11536/BKAD/SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 Lembar), beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :400/Pertanian/SPP-LS/XI/2018 tanggal SPP : 13 November 2018 (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran tahap II sebesar 70% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Perintis II Desa Rojonegoro Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 13 November 2018 (1 Lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 400/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018, tanggal 13 November 2018 (1 Lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Fatria Ahmad dan Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 14 November 2018 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 68 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:8771/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:8771/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018 (2 Lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:400/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (8 Lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor:400/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
 - Lembar Kontrol Nomor SPP: 400/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 yang diterima pada tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/400/SPM-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor :129/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
 - Rencana usulan kegiatan 30% (3 Lembar);
 - Buku Tabungan BRI BRITAMA No Rekening : 5151-01-033200-53-8 atas nama kelompok Tani Perintis II (1 Lembar);
- 68) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Perintis II Tahap III nomor : 14139/BKAD/SP2-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar), beserta :
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :580/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 18 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Perintis II Desa Rojonogero Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 69 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 18 Desember 2018 (1 Lembar);

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 580/Pertanian/SPM-LS/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu,A.Md , Fatria Ahmad dan Syaiful Biladali yang di paraf pada tanggal 18 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10395/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 10395/BKAD/SPD-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:580/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor: 580/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Perintis II Desa Rojonogero Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 18 Desember 2018 (1 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 580/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/580/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :150/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 70 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi buku tabungan BRI BRITAMA atas nama Kelompok tani Perintis II (1 Lembar);
 - Rencana usulan kegiatan 30% (2 Lembar);
 - Cetakan kode billing dengan jumlah setoran sebesar Rp. 97.500 (Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (1 Lembar);
 - Tanda terima setoran pajak (MPN Billing) dengan No Resi :96261-01/2018/816539 sebesar Rp. 97.500 (Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (1 Lembar);
 - Cetakan kode billing dengan jumlah setoran sebesar Rp. 388.500 (Tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (1 Lembar);
 - Tanda terima setoran pajak (MPN Billing) dengan No Resi :96261-01/2018/816540 sebesar Rp. 388.500 (Tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (1 Lembar);
 - Surat setoran pajak daerah (SSPD) Tahun 2018 Nomor : 003533/SSPD/06/1/2018 tanggal 11 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Nomor : 003316/SKPD/06/4/2018 tanggal 11 Desember 2018 (1 Lembar);
- 69) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Melati III Tahap II nomor : 11747/BKAD/SP2D-LS/XI/2018 tanggal 19 November 2018 (1 Lembar), beserta :
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :401/Pertanian/SPP-LS/XI/2018 tanggal SPP : 13 November 2018 (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran tahap II sebesar 70% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Melati III Desa Mustika Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 13 November 2018 (1 Lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 401/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018, tanggal 13 November 2018 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 71 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Fatria Ahmad dan Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 14 November 2018 (1 Lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:8767/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:8767/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018 (2 Lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:401/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (8 Lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor:401/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
 - Lembar Kontrol Nomor SPP: 401/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 yang diterima pada tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/401/SPM-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor :128/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
 - Rencana usulan kegiatan 30% (3 Lembar);
 - Buku Tabungan BRI BRITAMA No Rekening : 5151-01-033199-53-3 atas nama kelompok Tani Melati III (1 Lembar).
- 70) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Melati III Tahap III nomor : 14135/BKAD/SP2-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :570/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 14 Desember 2018 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 72 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Melati III Desa Mustika Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 570/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu,A.Md , Fatria Ahmad dan Syaiful Biladali yang di paraf pada tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10291/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 10291/BKAD/SPD-LS/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:570/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor:570/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 570/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/570/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :179/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (3 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 73 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.820.250 (Delapan Ratu Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96263-02/2018/808181 (2 Lembar);
 - SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2018 Nomor : 003527/SSPD/06/1/2018 (1 Lembar);
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Nomor : 003311/SKPD/06/4/2018 Tanggal 10 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Slip setoran Nomor : 015 01 12 0000001 Tanggal 10 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Fotokopi Buku Tabungan BRI BRITAMA No rekening 5151-01-033199-53-3 atas nama Kelompok Tani Melati III (1 Lembar);
- 71) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Maju Bersama Tahap II nomor : 11489/BKAD/SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 Lembar), beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :388/Pertanian/SPP-LS/XI/2018 tanggal SPP : 09 November 2018 (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran tahap II sebesar 70% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Maju Bersama Desa Kuala Lumpur Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 09 November 2018 (1 Lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 388/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018, tanggal 09 November 2018 (1 Lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu,A.Md dan Fatria Ahmad yang di paraf pada tanggal 09 November 2018 dan 12 November 2018 (1 Lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 09 November 2018 (2 Lembar);
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:8692/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 08

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 74 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- November 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 8692/BKAD/SPD-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:388/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 09 November 2018 (8 Lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor:388/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018 (2 Lembar);
 - Lembar Kontrol Nomor SPP: 388/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 yang diterima pada tanggal 09 November 2018 (2 Lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/388/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 09 November 2018 (2 Lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 09 November 2018 (2 Lembar);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor :124/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 09 November 2018 (2 Lembar);
 - Rencana usulan kegiatan 30% (3 Lembar);
- 72) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Maju Bersama Tahap III nomor : 12745/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :494/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 03 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Maju Bersama Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman Kab. Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 03 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 494/Pertanian/SPM-LS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu,A.Md , Fatria Ahmad dan Syaiful Biladali yang di paraf pada tanggal 4 Desember 2018 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 4 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:9566/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 30 November 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 9566/BKAD/SPD-LS/XI/2018 tanggal 30 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:494/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 (8 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor: 494/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 (2 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Maju Bersama Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman Kab. Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 03 Desember 2018 (1 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 494/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 04 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/494/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 03 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :157/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30 % (3 Lembar);
- Surat setoran pajak daerah (SSPD) Tahun 2018 Nomor : 003128/SSPD/06/1/2018 tanggal 28 November 2018 (1 Lembar);
- Surat tanda setoran no 18 18304 sebesar Rp 91.875 yang diterima pada tanggal 28 November 2018 (2 Lembar);
- Cetakan kode billing dengan jumlah setoran sebesar Rp. 78.000 (Tujuh Puluh delapan ribu rupiah) (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 76 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima setoran pajak (MPN Billing) dengan No Resi :96263-03/2018/831340 sebesar Rp. 78.000 (Tujuh Puluh delapan ribu rupiah) (1 Lembar);
 - Cetakan kode billing dengan jumlah setoran sebesar Rp. 584.250 (Lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) (1 Lembar);
 - Tanda terima setoran pajak (MPN Billing) dengan No Resi :96263-03/2018/831339 sebesar Rp. 584.250 (Lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) (1 Lembar);
 - Fotokopi buku tabungan BRI BRITAMA dengan No rekening 5151-01-033201-53-4 atas nama Kelompok tani maju bersama (1 Lembar).
- 73) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Moropoga jaya I Tahap II nomor : 11540/BKAD/SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 Lembar), beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :398/Pertanian/SPM-LS/XI/2018 tanggal SPP : 13 November 2018 (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran tahap II sebesar 70% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Moropoga Jaya I Desa Saripi Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 13 November 2018 (1 Lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 398/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018, tanggal 13 November 2018 (1 Lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Fatria Ahmad dan Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 14 November 2018 (1 Lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:8770/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 77 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8770/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018
(2 Lembar);

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:398/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (8 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor:398/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 398/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 yang diterima pada tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/398/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :131/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (3 Lembar);
- Buku Tabungan BRI BRITAMA No Rekening : 5151-01-033182-53-6 atas nama kelompok Moropoga jaya I (1 Lembar);

74) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Moropoga Jaya I Tahap III nomor : 14140/BKAD/SP2-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :576/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 17 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Moropoga Jaya I Desa Saripi Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 17 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 567/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 78 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Fatria Ahmad dan Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 18 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10287/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 10287/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:576/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor:576/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018 (2 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III sebesar 100% Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Moropoga Jaya I Desa saripi Kec. Paguyaman Kab. Boalemo TA. 2018 tanggal 17 Desember 2018 (1 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 576/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/576/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 17 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :185/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 (2 Lembar);
- Buku Tabungan BRI BRITAMA No Rekening : 5151-01-033162-53-6 atas nama kelompok Moropoga jaya I (1 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (2 Lembar);
- Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2018 Nomor : 003270/SSPD/06/1/2018 tanggal 03 Desember 2018 (1 Lembar);

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Halaman 79 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Nomor : 003071/SKPD/06/4/2018 tanggal 03 Desember 2018 (1 Lembar);
- Slip Setoran sebesar Rp. 91.875,- tanggal 03 Desember 2018 (1 Lembar);
- Tanda terima Setoran Pajak tanggal 03 Desember 2018 nomor 739286912 (2 Lembar);

75) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Cahaya Baru Tahap II nomor 14640/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:

- Kwitansi Pembayaran tahap II sebesar 70% pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal kelompok tani cahaya baru Desa Mananggu Kec.Mananggu Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 18 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 588/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Uсу, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Nomor 10512/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 10512/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tanggal 17 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 588/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor: 588/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 80 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lembar kontrol Nomor SPP: 588/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB LS) Nomor : 900/588/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Berita acara pembayaran Nomor :190/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Rencana usulan kegiatan 30% (3 Lembar);
 - Buku tabungan simpedes atas nama kelompok tani cahaya baru (1 Lembar).
- 76) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Cahaya Baru Tahap III nomor : 14982/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :599/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 19 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Cahaya Baru Desa Mananggu Kec.Mananggu Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 599/Pertanian/SPM-LS/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu,A.Md , Fatria Ahmad dan Syaiful Biladali yang di paraf pada tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10513/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10513/BKAD/SPD-LS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 (2 Lembar);

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:599/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor: 599/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Cahaya Baru Desa Mananggu Kec.Mananggu Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 599/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor:900/599/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :194/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Cetakan kode billing dengan jumlah setoran sebesar Rp. 855.000 (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) (1 Lembar);
- Tanda terima setoran pajak (MPN Billing) dengan No Resi :96265-02/2018/816711 sebesar Rp. 855.000 (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) (1 Lembar);
- Fotokopi buku tabungan BRI BRITAMA dengan No rekening 5151-01-033187-53-6 atas nama Kelompok tani cahaya baru (1 Lembar);
- Slip setoran sebesar Rp.91.875 tanggal 17 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat setoran pajak daerah (SSPD) Tahun 2018 Nomor : 003729/SSPD/06/1/2018 tanggal 17 Desember 2018 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 82 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



77) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Sumber Agung Tahap II
Nomor : 11508 / BKAD / SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November 2018
(1 lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 384/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 08 November 2018 (1 lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 384/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 8 November 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 9 November 2018 (2 lembar);
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 8590 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 6 November 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 8590 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 6 November 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 384/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 8 November 2018 (8 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 384/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 (2 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 8 November 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 384/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/304/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 83 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 120/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);
- Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 70%) (1 lembar);
- Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Sumber Agung (1 lembar).

78) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Sumber Agung Tahap III nomor : 14094/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :572/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Sumber Agung Desa Jatimulya Kec.Wonosari Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 572/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu,A.Md dan Fatria Ahmad yang di paraf pada tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10289/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 10289/BKAD/SPD-LS/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:572/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (7 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 84 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor:572/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 572/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/572/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :180/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (1 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.59.500 (Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) (2 Lembar);
- Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96263-03/2018/862809 (1 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.59.500 (Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) (2 Lembar);
- Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96263-03/2018/869811 (1 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.59.500 (Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) (1 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.84.000 (Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) (1 Lembar);
- Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96263-03/2018/802813, Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96263-03/2018/837814, (1 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.84.000 (Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) (2 Lembar);
- Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96263-03/2018/832815, Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96263-03/2018/832816 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 85 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.84.000 (Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) (1 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.101.500 (Seratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) (1 Lembar);
- Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96263-03/2018/832817, Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96263-03/2018/832818 (1 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) (1Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah) (1 Lembar);
- SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2018 Nomor : 003570/SSPD/06/1/2018, Tanggal 12 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Nomor : 003349/SKPD/06/4/2018, Tanggal 12 Desember 2018 (1 Lembar);
- Fotokopi Buku Tabungan BRI BRITAMA No rekening 5151-01-033982-53-8 atas nama Kelompok Tani Sumber Agung (1 Lembar).

79) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Darma Bakti I Tahap II Nomor : 11490 / BKAD / SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November 2018(1 lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 385/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 08 November 2018 (1 lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 385/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 8 November 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 9 November 2018 (2 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 86 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 8589 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 6 November 2018 (1 lembar);
 - Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 8589 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 6 November 2018 (1 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 385/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 8 November 2018 (8 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 385/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 (2 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 08 November 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
 - Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 385/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 (2 lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/385/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 122/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);
 - Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 70%) (1 lembar);
 - Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Darma Bakti I (1 lembar);
- 80) Surat Perintah Pencairan Dana Darma Bakti I Tahap III Nomor : 14890/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor 600/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan pembangunan embung kelompok tani darma bakti I Desa Bualo Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 87 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTANIAN) sebesar Rp 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);

- Naskah pengajuan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018, 2 Lembar;
- Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Nomor 10396/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 10396/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 600/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor:600/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018) tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat perintah membayar langsung No .SPM : 600/Pertanian/SPM-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Lembar kontrol No .SPP : 600/Pertanian/SPM-LS/XII/2018 diterima tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB LS) Nomor: 900/600/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian rencana penggunaan dana LS Tahun Anggaran 2018, kode rekening : 5.2.2.23.01 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :195/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Buku rekening tabungan BRI (BRITAMA) no rekening : 515101033218539 atas nama kelompok Tani Darma Bakti I (1 Lembar);

81) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Jurang Asih I Tahap II Nomor : 11517 / BKAD / SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 lembar), beserta:

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Halaman 88 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 383/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 08 November 2018 (1 lembar)
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 383/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 8 November 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 9 November 2018 (2 lembar);
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 8592 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 6 November 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 8592 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 6 November 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 383/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 8 November 2018 (10 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 383/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 (2 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 08 November 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 383/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/383/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 123/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);
- Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 70%) (1 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Jurang Asih I (1 lembar).
- 82) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Jurang Asih I Tahap III
Nomor : 14889 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018
(1 lembar), beserta:
 - Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 601/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap III sebesar 100% tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
 - Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10397 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10397 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 601/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (10 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 601/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 601/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap III sebesar 100% Pembangunan Embung Kelompok Tani Jurang Asih I Desa Bualo Kec. Paguyaman TA. 2018 Tanggal 19 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
 - Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 601/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 diterima tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 90 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/601/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 200/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Jurang Asih I dengan nomor rekening 5151-01-033193-53-7 (1 lembar);

83) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Merta Sari II Tahap II Nomor : 11491 / BKAD / SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 lembar), beserta:

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 11491 / BKAD / SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 lembar);
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 387/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 08 November 2018 (1 lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 387/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 8 November 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 9 November 2018 (2 lembar);
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 8588 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 6 November 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 8588 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 6 November 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 387/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 8 November 2018 (8 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 387/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 (2 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 8 November 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
 - Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 387/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 (2 lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/387/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 118/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 05 November 2018 (2 lembar);
 - Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 70%) (1 lembar);
 - Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Merta Sari II (1 lembar);
- 84) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Merta Sari II Tahap III Nomor : 14143 / BKAD / SP2-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar), beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 567/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap III sebesar 100% Pekerjaan Perkembangan Embung Kelompok Tani Merta Sari II Desa Tri Rukun Kec. Wonosari Kab. Boalemo TA. 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 567/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diverifikasi tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 92 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10295 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10295 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 567/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 567/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III sebesar 100% Pekerjaan Embung Kelompok Tani Merta Sari II Desa Tri Rukun Kec. Wonosari Kab. Boalemo TA. 2018 Tanggal 14 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 567/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 diterima tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/567/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 100%) (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setor Rp. 565.500,-(1 Lembar);
- Tanda Terima Setoran Pajak tanggal 06 Desember 2018 nomor 739287453 (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setor Rp. 179.700,-(1 Lembar);
- Tanda Terima Setoran Pajak tanggal 06 Desember 2018 nomor 739287451 (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setor Rp. 671.250,- (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 93 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Setoran Pajak tanggal 06 Desember 2018 nomor 739287452 (1 lembar);
- Surat Setoran Pajak Daerah nomor: 03355/SSPD/06/1/2018 tanggal 05 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Ketetapan pajak daerah Nihil Nomor : 003154/SKPD/06/4/2018 tanggal 05 Desember 2018
- Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Merta Sari II dengan nomor rekening 5151-01-033192-53-1 (1 lembar);

85) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Maju Bersama Tahap III Nomor : 12406 / BKAD / SP2D-LS/XI/2018 tanggal 30 November 2018 (1 lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 nomor SPP : 415/PPERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III tanggal 16 November 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 415/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 November 2018 (2 lembar);
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 9090 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 15 November 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 9090 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 15 November 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 415/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (8 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 94 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 415/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (1 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap III Tanggal 16 November 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
 - Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 415/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 (2 lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/415/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 16 November 2018 (2 lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 15 November 2018 (2 lembar);
 - Foto Kopi Buku Rekening Kelompok Tani Maju Bersama (1 lembar);
 - Cetakan Kode Billing ID Billing 0181 1574 4281 436 (1 lembar);
 - Tanda Terima Setoran Pajak 739285800 tanggal 28 November 2018 (1 lembar);
 - Cetakan Kode Billing ID Billing 0181 1574 5161 141 (1 lembar);
 - Tanda Terima Setoran Pajak 739285801 tanggal 28 November 2018 (1 lembar);
 - Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2018 Nomor : 003148/SSPD/06/1/2018 tanggal 29 November 2018 (1 lembar);
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Nomor : 002980/SKPD/06/4/2018 tanggal 29 November 2018 (1 lembar);
 - Foto Kopi Slip Setoran tanggal 29 November 2018 (1 lembar);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 134/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (2 lembar);
 - Rencana Usulan Kegiatan 30% ke 2 (total 100%) (1 lembar);
- 86) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Mandiri III Tahap II nomor : 11516/BKAD/SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 Lembar), beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 386/Pertanian/SPP-LS/XI/2018 tanggal SPP : 08 November 2018 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 95 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran tahap II sebesar 70% pekerjaan Pembangunan Embung Kelompok Tani Mandiri III Desa Piloliyanga Kec.Tilamuta Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 08 November 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 386/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018, tanggal 8 November 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y. Usu, A.Md dan Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 09 November 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:8616/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 06 November 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 8616/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 06 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:386/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (8 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor:386/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 386/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 yang diterima pada tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/386/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :119/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 96 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan BRI BRITAMA No Rekening : 5151-01-033213-53-1 atas nama kelompok Tani Mandiri (2 Lembar).
- 87) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Mandiri III Tahap III Nomor : 14095 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar), beserta:
 - Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 nomor SPP : 566/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap III tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 566/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10296 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
 - Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10296 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 566/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 566/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap III Tanggal 14 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
 - Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 566/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 97 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/566/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 175/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Rencana Usulan Kegiatan 30% ke 2 (total 100%) (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing nomor ID Billing 0181 2019 6336 156 (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing nomor ID Billing 0181 2019 6923 149 (1 lembar);
- Tanda Terima Pajak 739287135 tanggal 03 Desember 2018 dan Tanda Terima Pajak 739287136 tanggal 03 Desember 2018 (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing nomor ID Billing 0181 2019 8123 722 (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing nomor ID Billing 0181 2020 4474 113 (1 lembar);
- Tanda Terima Pajak 739287137 tanggal 03 Desember 2018 dan Tanda Terima Pajak 739287138 tanggal 03 Desember 2018 (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing nomor ID Billing 0181 2020 5026 121 (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing nomor ID Billing 0181 2020 6055 721 (1 lembar);
- Tanda Terima Pajak 739287139 tanggal 03 Desember 2018 dan Tanda Terima Pajak 739287140 tanggal 03 Desember 2018 (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing nomor ID Billing 0181 2020 5423 351 (1 lembar);
- Tanda Terima Pajak 739287141 tanggal 03 Desember (1 lembar);
- Foto Kopi Buku Rekening Kelompok Tani Mandiri III (1 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 98 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



88) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Iloheluma IV Tahap II nomor :11507/BKAD/SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 Lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 382/Pertanian/SPP-LS/XI/2018 tanggal SPP : 08 November 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap II sebesar 70% pekerjaan pembangunan Dam Parit Kelompok Tani Iloheluma IV Desa Mutiara Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 08 November 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 382/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Uсу, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 09 November 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 08 November 2018 2 Lembar;
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:8591/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 06 November 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 8591/BKAD/SPD-LS/XI/2018 tanggal 06 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 382/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tanggal 08 November 2018 (8 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor: 382/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP : 382/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 yang diterima pada tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/382/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :121/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (1 Lembar);
- Tabungan BRI BRITAMA No rekening : 5151-01-033191-53-5 atas nama Kelompok Tani Iloheluma IV (1 Lembar);

89) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Iloheluma IV Tahap III nomor:14136/BKAD/SP2-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 568/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 04 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan pembangunan Dam Parit Kelompok Tani Iloheluma IV Desa Mutiara Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 568/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladali yang di paraf pada tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10294/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10294/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (2 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 100 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 568/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor: 568/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III sebesar 100% Pekerjaan Pembangunan Dam Parit Kelompok Tani Iloheluma IV Desa Mutiara Kec. Paguyaman Kab. Boalemo TA. 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP : 568/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/568/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :176/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (1 Lembar);
- Tanda Terima Setoran Pajak 548216051 tanggal 10 Desember 2018 (1 Lembar);
- Tanda Terima Setoran Pajak 548216052 tanggal 10 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Setoran Pajak Daerah Nomor : 003515/SSPD/06/1/2018 tanggal 10 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Nomor : 003301/SKPD/06/4/2018 tanggal 10 Desember 2018 (1 Lembar);
- Slip Setoran Nomor 015 01 12 0000001 sebesar 1.886.250,- tanggal 10 Desember 2018 (1 Lembar);
- Tabungan BRI BRITAMA No rekening : 5151-01-033191-53-5 atas nama Kelompok Tani Iloheluma IV (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 101 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Mufakat Tahap II nomor : 14134/BKAD/SP2-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 579/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 18 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap II sebesar 70% pekerjaan DAM Parit Kelompok Tani Mufakat Desa Mananggu Kec.Mananggu Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 18 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 579/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 18 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10391/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:10391/BKAD/SPD-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:579/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor: 579/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPM:579/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/579/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 102 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor :186/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Rencana usulan kegiatan 70% (1 Lembar);
 - Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.727.500 (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96265-02/2018/816714 (2 Lembar);
 - Buku Tabungan BRI BRITAMA No Rekening : 5151-01-033995-53-1 atas nama kelompok tani mufakat (1 Lembar);
- 91) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Mufakat Tahap III nomor : 14892/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 588/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 18 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan DAM Parit Kelompok Tani Mufakat Desa Mananggu Kec.Mananggu Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10390/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:10390/BKAD/SPD-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 103 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:589/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (12 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM:589/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor: 589/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPM:589/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/589/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :191/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (1 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.727.500 (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96265-02/2018/816714 (2 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.892.500 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96265-02/2018/816715 (2 Lembar);
- SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun 2018 Nomor : 003728/SSPD/06/1/2018 Tanggal 17 Desember 2018 (1 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.57.000 (Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah), Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96265-02/2018/816712 (2 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 104 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah), Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96265-02/2018/816713 (2 Lembar);
- 92) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Iloponu Tahap II nomor : 11954/BKAD/SP2D-LS/XI/2018 tanggal 22 November 2018 (1 Lembar), beserta:
 - Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :413/Pertanian/SPP-LS/XI/2018 tanggal SPP : 16 November 2018 (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran tahap II sebesar 70% pekerjaan DAM Parit Kelompok Tani Iloponu Desa Tanjung Harapan Kec.Wonosari Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 16 November 2018 (1 Lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 19 November 2018 (1 Lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 November 2018 (2 Lembar);
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:9089/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 15 November 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:9089/BKAD/SPD-LS/XII/2018 tanggal 15 November 2018 (2 Lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:413/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (8 Lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor: 413/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 16 November 2018 (2 Lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 413/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 105 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



- Lembar Kontrol Nomor SPM:413/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 yang diterima pada tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/413/SPM-LS/XII/2018 tanggal 16 November 2018 (2 Lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 16 November 2018 (2 Lembar);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor :145/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 16 November 2018. (2 Lembar);
 - Rencana usulan kegiatan 30% (1 Lembar);
 - Buku Tabungan BRI BRITAMA No Rekening : 5151-01-033186-53-0 atas nama kelompok tani iloponu (1 Lembar);
- 93) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Iloponu Tahap III nomor : 14078/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :569/Pertanian/SPP-LS/XI/2018 tanggal SPP : 14 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan DAM Parit Kelompok Tani Iloponu Desa Tanjung Harapan Kec.Wonosari Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM : 569/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10292/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:10292/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018. (2 Lembar);

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:569/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 10292/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor: 569/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III sebesar 100% Pekerjaan Pembangunan Dam Parit Kelompok Tani Iloponu Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo TA. 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPM:569/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/564/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :177/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (1 Lembar);
- Slip setoran nomor 015 01 12 0000001 tanggal 6 Desember 2018 (1 Lembar);
- Buku Tabungan BRI BRITAMA No Rekening : 5151-01-033186-53-0 atas nama kelompok tani iloponu (1 Lembar);
- Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2018 Nomor 003393/SSPD/06/1/2018 tanggal 06 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Nomor : 003190/SKPS/06/4/2018 Tanggal 06 Desember 2018 (1 Lembar);
- Tanda terima setoran pajak tanggal 06 Desember 2018 nomor 739287307 dan 739287304 (1 Lembar);
- Tanda terima setoran pajak tanggal 06 Desember 2018 nomor 739287312 dan 739287313 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 107 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima setoran pajak tanggal 06 Desember 2018 nomor 739287308 dan 739287309 (1 Lembar);
 - Tanda terima setoran pajak tanggal 06 Desember 2018 nomor 739287310 dan 739287311 (1 Lembar);
 - Tanda terima setoran pajak tanggal 06 Desember 2018 nomor 739287305 dan 739287306 (1 Lembar).;
- 94) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) TA. 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo tanggal 02 Oktober 2018;
- 95) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Nomor : 46 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018;
- 96) 9 (sembilan) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 04 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;
- 97) 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 46 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 04 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di lingkungan SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;
- 98) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Pada Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penetapan Koordinator Lapangan / Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Tingkat

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 108 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pada Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Provinsi
Gorontalo Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;

- 99) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 231 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018;
- 100) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Nomor : 39 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Fasilitator Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;
- 101) 6 (enam) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Nomor : 38.a Tahun 2018 Tentang Honor Tim Fasilitator Jasa Perencanaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan (DAU) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;
- 102) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Nomor : 39.a Tahun 2018 Tentang Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Embung Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;
- 103) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Nomor : 39.c Tahun 2018 Tentang Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Dam Parit Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Agustus 2018 beserta lampiran;
- 104) 6 (enam) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Nomor : 39.e Tahun 2018 Tentang Honor Tim Fasilitator Jasa Pengawasan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan (DAK) Dinas

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 109 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;

105) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Nomor : 39.b Tahun 2018 Tentang Honor Tim Fasilitator Pengawasan Pembangunan Embung Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;

106) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Nomor : 39.d Tahun 2018 Tentang Honor Tim Fasilitator Pengawasan Pembangunan Dam Parit Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;

107) Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA 2018 nomor :15024/BKAD/SP2-L5/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018, beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :618/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 20 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN IRIGASI AIR TANAH DANGKAL TA 2018 sebesar Rp39.910.000 tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladili yang di paraf pada tanggal 21 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 21 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10223/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:10223/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018. (3 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 110 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 618/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (5 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor: 618/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPM:618/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 21 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah membayar langsung Nomor SPM:618/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB LS) Nomor:900/618/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018(1 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor:38.a Tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 (6 Lembar);
- Besaran Honor Tim Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal nomor 38.a tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 (1 Lembar);
- Surat permohonan 100% tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar),
- Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal (Ketua) Rp 1.150.000/Kelompok, Rp.14.950.000 untuk 13 Kelompok tanggal 20 Desember 2018 atas nama Helmi Ningo, ST;
- Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal (Sekertaris) Rp 800.000/Kelompok ,Rp.10.400.000 untuk 13 Kelompok tanggal 20 Desember 2018 atas nama YULI PURWANTI SAPTANINGTIAS NG, ST;
- Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal (Anggota) Rp 560.000/Kelompok ,Rp.7.280.000

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 111 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk 13 Kelompok tanggal 20 Desember 2018 atas nama ABDULRASID AYUB. ST;

- Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal (Anggota) Rp 560.000/Kelompok ,Rp.7.280.000 untuk 13 Kelompok tanggal 20 Desember 2018 atas nama SADAM DJIBU;
- Pengguna Anggaran atas nama Helmi Ningo ST,Yuli Purwanti Saptaningtias Ng, SP, Abdurasyid Ayub ST, Sadam Djibu; (1 Lembar);

108) Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA 2018 Nomor :14557/BKAD/SP2-L5/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :569/Pertanian/SPP-LS/XI/2018 tanggal SPP : 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Daftar Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 619/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladili yang di paraf pada tanggal 21 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 21 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10224/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:10224/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018. (3 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:619/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (5 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran Belanja Konsultasi Pengawasan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA 2018 sebesar 34.970.000 tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPM:619/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 21 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah membayar langsung Nomor SPM:619/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor:900/619/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat permohonan 100% (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal (Ketua) Rp 1.000.000/Kelompok ,Rp.13.000.000 untuk 13 Kelompok tanggal 20 Desember 2018 atas nama FIKRIYANTO DJIBU;
- Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal (Sekertaris) Rp 690.000/Kelompok ,Rp.8.970.000 untuk 13 Kelompok tanggal 20 Desember 2018 atas nama HIRAWATI BOLOTA, S.Ap;
- Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal (Anggota) Rp 500.000/Kelompok ,Rp.6.500.000 untuk 13 Kelompok tanggal 20 Desember 2018 atas nama WARJON AHMAD, S.Kom;
- Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal (Anggota) Rp 500.000/Kelompok ,Rp.6.500.000 untuk 13 Kelompok tanggal 20 Desember 2018 atas nama IDRIS DJIBU;
- Pengguna Anggaran atas nama Fikriyanto Djibu, Hirawati Bolota, S.Ap, Warjon Ahmad, S.Kom, Idris Djibu; (1 Lembar)

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 113 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak tanggal 20 Desember 2018;
- Keputusan Kepala Dinas Nomor:39.c Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 (5 Lembar);
- Besaran Honor Tim Fasilitator Pengawasan Irigasi Air Tanah Dangkal tanggal 20 Agustus 2018 (1 Lembar);

109) Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Embung TA.2018. (SD-DAK REGULER PERTANIAN) nomor :12320/BKAD/SP2D-LS/XI/2018 tanggal 28 November 2018, beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :417/Pertanian/SPP-LS/XI/2018 tanggal SPP : 16 November 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 417/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (1Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladili yang di paraf oleh Fatria Ahmad dan Syaiful Biladili pada tanggal 22 November 2018 dan 26 November 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 26 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:9093/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 15 November 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:9093/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 15 November 2018. (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:417/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (4 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 417/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 114 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Belanja Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Dam Parit TA.2018 sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah). (SD-DAK REGULER PERTANIAN) tanggal 16 November 2018 (1 Lembar);
- Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor:900/417/SKTJM/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (1 Lembar);
- Rekomendasi atas nama SOFYAN HASAN, STP, MM tanggal 16 November 2018;
- Lembar Kontrol Nomor SPM:417/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 yang diterima pada tanggal 26 November 2018 (1 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/417/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (1 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 16 November 2018 (1 Lembar);
- Daftar Pembayaran Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Embung Tahun Anggaran 2018 Bulan November 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran Honor Ketua Fasilitator Sebesar Rp.5.500.000,00 atas nama Helmi Ningo. ST, Kwitansi Pembayaran Honor Sekretaris Fasilitator Sebesar Rp.4.500.000,00 atas nama Yuli Purwanti Sataningtias NG.SP (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran Honor Anggota Fasilitator Sebesar Rp.4.000.000,00 atas nama Aslan Ismail, Kwitansi Pembayaran Honor Anggota Fasilitator Sebesar Rp.4.000.000,00 atas nama Sadam Djibu (1 Lembar);
- NPWP : 64.131.893.6-822.000 atas Nama Helmi Ningo (1 Lembar);
- Buku rekening Tabungan BRI SIMPEDES dengan Nomor :5151-01-026200-53-9 atas nama Helmi Ningo (1 Lembar);
- Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor:39.a Tahun 2018 Tentang Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Embung Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 115 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Agustus 2018 (5 Lembar);

- Besaran Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Dam Parit Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 (1 Lembar);

110) Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Dam Parit TA.2018. (SD-DAK REGULER PERTANIAN) nomor :12321/BKAD/SP2D-LS/XI/2018 tanggal 28 November 2018, beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :416/Pertanian/SPP-LS/XI/2018 tanggal SPP : 16 November 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladili yang di paraf oleh Fatria Ahmad dan Syaiful Biladili pada tanggal 22 November 2018 dan 26 November 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 26 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 9092/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 15 November 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor : 9092/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 15 November 2018. (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 416/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (4 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 416/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 (1Lembar);
- Kwitansi Pembayaran Belanja Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Dam Parit TA.2018 sebesar

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 116 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). (SD-DAK REGULER PERTANIAN) tanggal 16 November 2018 (1 Lembar);

- Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor:900/416/SKTJM/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (1Lembar);
- Rekomendasi atas nama SOFYAN HASAN, STP, MM tanggal 16 November 2018;
- Lembar Kontrol Nomor SPM:416/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 yang diterima pada tanggal 26 November 2018 (1 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/416/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (1Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 16 November 2018 (1 Lembar);
- Daftar Pembayaran Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Dam Parit Tahun Anggaran 2018 Bulan November 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran Honor Ketua Fasilitator Sebesar Rp.8.500.000,00 atas nama Helmi Ningo. ST, Kwitansi Pembayaran Honor Sekretaris Fasilitator Sebesar Rp.7.500.000,00 atas nama Yuli Purwanti Sataningtias NG.SP (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran Honor Anggota Fasilitator Sebesar Rp.6.500.000,00 atas nama Aslan Ismail, Kwitansi Pembayaran Honor Anggota Fasilitator Sebesar Rp.6.500.000,00 atas nama Sadam Djibu (1 Lembar);
- NPWP : 64.131.893.6-822.000 atas Nama Helmi Ningo (1Lembar);
- Buku rekening Tabungan BRI SIMPEDES dengan Nomor :5151-01-026200-53-9 atas nama Helmi Ningo (1 Lembar);
- Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor:39.c Tahun 2018 Tentang Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Dam Parit Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Agustus 2018 (5 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 117 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besaran Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Dam Parit Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 (1 Lembar);

111) Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Honor Tim Fasilitator Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Embung TA.2018. (SD-DAK REGULER PERTANIAN) nomor :14670/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :592/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 592/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladili yang di paraf pada tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10285/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:10285/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018. (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak Nomor: 900/591/Distan/SPTJW/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (1Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:592/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (5 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 592/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 (1Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 118 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Belanja Honor Tim Fasilitator Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Embung TA.2018 sebesar Rp.21.659.000,- (Dua puluh satu juta enam ratus lima puluh Sembilan juta rupiah). (SD-DAK REGULER PERTANIAN) tanggal 19 November 2018 (1 Lembar);
- Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor:900/591/DISTAN/SKTJM/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1Lembar);
- Rekomendasi atas nama SOFYAN HASAN, STP, MM tanggal 19 Desember 2018;
- Lembar Kontrol Nomor SPM:592/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/592/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Daftar Pembayaran Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Embung Tahun Anggaran 2018 Bulan Desember 2018 (1 Lembar);
- NPWP : 75.739.983.7-822.000 atas Nama Fikriyanto Djibu (1Lembar);
- Buku rekening Tabungan Mandiri dengan Nomor :150-00-1210488-9 atas nama Fikriyanto Djibu (1 Lembar);
- Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor:39.b Tahun 2018 Tentang Honor Tim Fasilitator Pengawasan Pembangunan Embung Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Agustus 2018 (5 Lembar);
- Besaran Honor Tim Fasilitator Perencanaan Dan Tim Pengawasan Embung Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 119 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



112) Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Honor Tim Fasilitator Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Dam Parit TA.2018. (SD-DAK REGULER PERTANIAN) nomor :14654/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :591/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 591/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladili yang di paraf pada tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10286/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor : 10286/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018. (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 900/591/Distan/SPTJW/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (1Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 591/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (5 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 591/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 (1Lembar);
- Kwitansi Pembayaran Belanja Honor Tim Fasilitator Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Dam Parit TA.2018 sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). (SD-DAK REGULER PERTANIAN) tanggal 19 November 2018 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 120 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 900/591/DISTAN/SKTJM/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1Lembar);
 - Rekomendasi atas nama SOFYAN HASAN, STP, MM tanggal 19 Desember 2018;
 - Lembar Kontrol Nomor SPM:591/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/591/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1Lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Daftar Pembayaran Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Dam Parit Tahun Anggaran 2018 Bulan Desember 2018 (1 Lembar);
 - Buku rekening Tabungan Mandiri dengan Nomor :150-00-1210488-9 atas nama Fikriyanto Djibu (1 Lembar);
 - NPWP : 75.739.983.7-822.000 atas Nama Fikriyanto Djibu (1Lembar);
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor:39.d Tahun 2018 Tentang Honor Tim Fasilitator Pengawasan Pembangunan Dam Parit Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Agustus 2018 (5 Lembar);
 - Besaran Honor Tim Fasilitator Perencanaan Dan Tim Pengawasan Dam Parit Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 (1 Lembar);
- 113) 1 (satu) Bundel Daftar Berita Acara Penyerahan Asset Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 dan Surat Pernyataan Kesanggupan Menjaga, Memelihara Serta Memanfaatkan Asset Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 121 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Kegiatan Dak Bidang Pertanian Tahun 2018;
- 115) 1 (satu) Bundel Laporan Tim Fasilitator Perencana Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Kegiatan Penyediaan Sarana Peroduksi Pertanian/Perkebunan Pekerjaan Embung Lokasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018;
- 116) 1 (satu) Bundel Laporan Tim Fasilitator Perencana Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Kegiatan Penyediaan Sarana Peroduksi Pertanian/Perkebunan Pekerjaan Dam Parit Lokasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018;
- 117) 1 (satu) Bundel Laporan Fasilitator Pekerjaan Dam Parit, Embung Dan Irigasi Air Tanah Dangkal Pada Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018; *dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo*;
- 118) Uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 119) Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rup iah);
- 120) Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 121) Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 122) Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 123) Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 124) Uang tunaisejumlahRp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), *dirampas untuk negara*.

1. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto Tanggal 20 Nopember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP., M.M. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP., M.M.oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Halaman 122 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP., M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP., M.M. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan apabila terpidana tidak membayar maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/43/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Sumber Agung Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
 - 2) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/44/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Merta Sari II Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
 - 3) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/45/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Darma Bakti I Tentang

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 4) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/46/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Jurang Asih I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 5) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/47/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Maju Bersama Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 6) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/48/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Mandiri III Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 7) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/49/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Mufakat Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dam Parit melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 8) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/50/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Iloheluma IV Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dam Parit melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 9) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/51/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Iloponu Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dam Parit melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 10) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/52/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 124 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Jaya Makmur Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

- 11) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/54/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Mekar Wangi Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 12) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/55/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Cahaya Baru Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 13) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/56/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Berkat Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 14) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/57/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Cipta Karya I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 15) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/58/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Karya Bersama Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 16) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/59/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Perintis II Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



- 17) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/60/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Sri Tani I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 18) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/61/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Moropoga Jaya I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 19) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/62/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Melati III Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 20) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/63/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Ingin Hidup III Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 21) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/64/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Maju Bersama Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 22) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/65/SPK/DISTAN-PSP-D AK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Melati V Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- 23) Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/65/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Mananggu Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

- 24) (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (Dak) Bulan Agustus 2018;
- 25) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung jawaban Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Bulan Oktober 2018;
- 26) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Cipta Karya I Desa Bongo Tua Kec. Paguyaman;
- 27) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Maju Bersama Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman;
- 28) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Moropoga Jaya I Desa Saripi Kec. Paguyaman;
- 29) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Melati V Desa Mustika Kec. Paguyaman;
- 30) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Ingin Hidup III Desa Wonggahu Kec. Paguyaman;
- 31) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Perintis II Desa Rejonegoro Kec. Paguyaman;
- 32) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Melati III Desa Mustika Kec. Paguyaman;
- 33) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Karya Bersama Desa Permata Kec. Paguyaman;
- 34) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Sri Tani I Desa Bongo IV Kec. Paguyaman;

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Halaman 127 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Mekar Wangi Desa Mekar Jaya Kec. Wonosari;
- 36) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Tri Rukun Kec. Wonosari;
- 37) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Berkas Desa Buti Kec. Mananggu;
- 38) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 Kelompok Tani Cahaya Baru Desa Mananggu Kec. Mananggu;
- 39) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA. 2018 BPP Mananggu Desa Pontolo Kec. Mananggu;
- 40) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Embung TA. 2018 Kelompok Tani Maju Bersama Desa Pentadu Timur Kec. Tilamuta;
- 41) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Embung TA. 2018 Kelompok Tani Mandiri III Desa Piloliyanga Kec. Tilamuta;
- 42) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Embung TA. 2018 Kelompok Tani Merta Sari II Desa Tri Rukun Kec. Wonosari;
- 43) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Embung TA. 2018 Kelompok Tani Sumber Agung Desa Jatimulya Kec. Wonosari;
- 44) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Embung TA. 2018 Kelompok Tani Jurang Asih I Desa Bualo Kec. Paguyaman;
- 45) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Embung TA. 2018 Kelompok Tani Darma Bakti I Desa Bualo Kec. Paguyaman;

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Halaman 128 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Dam Parit TA. 2018 Kelompok Tani Iloponu Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari;
- 47) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Dam Parit TA. 2018 Kelompok Tani Mufakat Desa Mananggu Kec. Mananggu;
- 48) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana DAK Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Dam Parit TA. 2018 Kelompok Tani Iloheluma IV Desa Mutiara Kec. Paguyaman;
- 49) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Mekar Wangi Tahap II Nomor : 11893 / BKAD / SP2D-LS/XI/2018 tanggal 22 November 2018, beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 414/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018;
 - Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 16 November 2018;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 414/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018;
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 November 2018;
 - Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 9094 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 15 November 2018;
 - Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 9094 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 tanggal 15 November 2018;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 414/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 414/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018;
 - Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 16 November 2018 bermaterai 6000;
 - Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 414/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 129 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/414/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018;
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 16 November 2018;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 133/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 16 November 2018;
 - Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (total 70%);
 - Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Mekar Wangi;
- 50) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Mekar Wangi Tahap III Nomor : 14093 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018, beserta;
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 575/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018
 - Kwitansi Pembayaran Tahap III tanggal 17 Desember 2018;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 575/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 18 Desember 2018;
 - Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10288 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018;
 - Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10288 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 575/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 575/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018;
 - Kwitansi Pembayaran Tahap III Tanggal 17 Desember 2018 bermaterai 6000;
 - Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 575/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 130 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/575/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018;
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 184/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Cetakan Kode Billing;
- Tanda Terima Setoran Pajak No. Resi : 96263-03/2018/832848 tanggal 12 Desember 2018;
- Tanda Terima Setoran Pajak No. Resi : 96263-03/2018/832847 tanggal 12 Desember 2018;
- Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2018 Nomor : 003595/SSPD/06/1/2018 tanggal 12 Desember 2018;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor : 003374/SKPD/06/4/2018 tahun 2018;
- Foto kopi Slip Setoran tanggal 12 Desember 2018;
- Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Mekar Wangi;

51) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Ingin Hidup III Tahap II Nomor : 11562 / BKAD / SP2D-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018, beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 399/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018;
- Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 13 November 2018;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 399/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018;
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 13 November 2018;
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 8769 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 9 November 2018;
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 8769 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 tanggal 9 November 2018;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 131 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 399/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 399/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 13 November 2018;
- Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 13 November 2018 bermaterai 6000;
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 399/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/ /SPTB-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018;
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 13 November 2018;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 130/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 13 November 2018;
- Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (total 70%);
- Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Ingin Hidup III;

52) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Ingin Hidup III Tahap III Nomor : 14107 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018, beserta :

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 564/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 564/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018(2 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 132 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10293 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10293 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 564/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 564/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III Tanggal 14 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 564/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/564/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 172/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Rencana Usulan Kegiatan 30% ke 2 (Total 100%) (3 lembar);
- Cetakan Kode Billing (1 lembar);
- Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2018 Nomor : 003498/SSPD/06/1/2018 tanggal 10 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor : 003290/SKPD/06/4/2018 tahun 2018 (1 lembar);
- Surat Tanda Setoran No. 18 18412 tanggal 10 Desember 2018 (1 lembar);
- Foto kopi Slip Setoran tanggal 10 Desember 2018 (1 lembar);
- Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Ingin Hidup III (1 lembar).

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 133 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



53) Surat Perintah Pencairan Dana BPP Mananggu Desa Pontolo Tahap II Nomor : 14926 / BKAD / SP2D-LSXII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (1 lembar), beserta :

- Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 18 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 587/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018(2 lembar);
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10393 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10393 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 587/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (10 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 587/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018: (2 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 18 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 587/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/557/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 187/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



- Rencana Usulan Kegiatan 30% (tahap II 70%) (2 lembar);
- Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Pajak) tanggal 18 Desember 2018 (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing (1 lembar);
- Foto kopi buku rekening BPP Mananggu (1 lembar);

54) Surat Perintah Pencairan Dana BPP Mananggu Desa Pontolo Tahap III Nomor : 14964 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (1 lembar), beserta:

- Kwitansi Pembayaran Tahap III tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10392 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10392 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 590/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (10 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 590/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 590/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III Tanggal 19 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 590/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/590/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 192/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Rencana Usulan Kegiatan 30% (Tahap III 100%) (2 lembar);
- Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2018 Nomor : 003794/SSPD/06/1/2018 tanggal 18 Desember 2018 (1 lembar);
- Foto Kopi Slip Setoran tanggal 18 Desember 2018 (1 lembar);
- Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Pajak) tanggal 18 Desember 2018 (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing (1 lembar);
- Foto Kopi Buku Rekening BPP Mananggu (1 lembar);

55) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Cipta Karya I Tahap II Nomor : 14092 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 561/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 561/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018(2 lembar);
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10282 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 136 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10282 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 561/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 561/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 14 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 561/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/561/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 169/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 70%) (3 lembar);
- Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Cipta Karya I (1 lembar).

56) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Cipta Karya I Tahap III Nomor : 14893 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (1 lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 603/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 137 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10399 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10399 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 603/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (10 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 603/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 603/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III Tanggal 19 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 603/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/603/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 198/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Foto Kopi buku Rekening Kelompok Tani Cipta Karya I (1 lembar);

57) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Karya Bersama Tahap II Nomor : 14091 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 563/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 138 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 14 Desember 2018 1 lembar;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 561/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10283 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10283 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 563/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 563/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 14 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 563/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/563/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 171/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 70%) (3 lembar);
- Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Karya Bersama (1 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 139 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



58) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Karya Bersama Tahap III Nomor : 14891 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (1 lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 602/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018(2 lembar);
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10398 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10398 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 602/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (10 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 602/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 602/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III Tanggal 19 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 602/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/602/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 140 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 199/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- 59) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Berkat Tahap II Nomor : 11492 / BKAD / SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 lembar), beserta:
 - Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 389/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 09 November 2018 (1 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 09 November 2018 (1 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 09 November 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 389/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 9 November 2018 (1 lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 9 November 2018 (2 lembar);
 - Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 8693 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 (1 lembar);
 - Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 8693 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 (1 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 389/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 9 November 2018 (8 lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 389/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 9 November 2018 (2 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 141 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 389/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 (2 lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/389/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 09 November 2018 (2 lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 09 November 2018 (2 lembar);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 125/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 09 November 2018 (2 lembar);
 - Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 70%) (3 lembar);
- 60) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Berkat Tahap III nomor : 14142/BKAD/SP2-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:
- Surat perintah pencairan dana nomor : 14142/BKAD/SP2-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018.(1 Lembar);
 - Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :565/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 14 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Berkat Desa Buti Kec.Mananggu Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluhan Juta Rupiah) tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 565/Pertanian/SPP-LS/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu,A.Md , Fatria Ahmad dan Syaiful Biladali yang di paraf pada tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018. (2 Lembar);
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10297/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 142 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 10297/BKAD/SPD-LS/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 (2 Lembar);

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 565/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 565/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 565/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/565/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :173/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (2 Lembar);
- Tanda terima setoran pajak (MPN Billing) dengan No Resi : 96265-02/2018/815811 sebesar Rp.76.500 (Tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), No Resi :96265-02/2018/815812 sebesar Rp.102.000 (seratus dua ribu rupiah), No Resi :96265-02/2018/815809 sebesar Rp.76.500 (Tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), dan No Resi :96265-02/2018/815810 sebesar Rp.76.500 (Tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) (2 Lembar);
- Surat setoran pajak daerah (SSPD) Tahun 2018 Nomor : 003169/SSPD/06/1/2018 tanggal 29 November 2018 (1 Lembar);
- Fotokopi buku tabungan BRI BRITAMA atas nama Kelompok Tani Berkat (1 Lembar);

- 61) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Jaya Makmur Tahap II Nomor : 14137 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar), beserta:

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 143 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 14137 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 562/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 562/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018(2 lembar);
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10284 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10284 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 562/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 562/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 14 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 562/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/562/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 144 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 168/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 70%) (3 lembar);
- Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Jaya Makmu (1 lembar);

62) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Jaya Makmur Tahap III nomor : 15169/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 (1 Lembar), beserta :

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :604/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Tri Rukun Kec.Wonosari Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu,A.Md , Fatria Ahmad dan Syaiful Biladali yang di paraf pada tanggal 21 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 21 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10593/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 10593/BKAD/SPD-LS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 604/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 604/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 145 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 604/Pertanian/SPM-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Tri Rukun Kec.Wonosari Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 604/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 21 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/604/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita acara pembayaran Nomor:218/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat setoran pajak daerah (SSPD) Tahun 2018 Nomor : 003356/SSPD/06/1/2018 tanggal 05 Desember 2018 (1 Lembar).

63) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Sri Tani I Tahap II Nomor : 14141 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 560/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 560/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 146 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10281 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10281 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 560/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 14 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 560/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/560/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 170/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 70%) (3 lembar);
- Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Sri Tani I (1 lembar);

64) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Sri Tani I tahap III nomor : 15137/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :597/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Sri Tani Desa Bongo IV Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 147 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 597/Pertanian/SPM-LS/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu,A.Md , Fatria Ahmad dan Syaiful Biladali yang di paraf pada tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10394/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 10394/BKAD/SPD-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 597/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 597/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Sri Tani Desa Bongo IV Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 597/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/597/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 148 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Pembayaran Nomor :193/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Rencana usulan kegiatan 30% (3 Lembar);
 - Tanda terima setoran pajak (MPN Billing) dengan No Resi : 96263-02/2018/808484 sebesar Rp.598.500 (Lima ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (1 Lembar);
 - Cetakan kode billing dengan jumlah setoran sebesar Rp. 598.500 (Lima ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (1 Lembar);
 - Surat setoran pajak daerah (SSPD) Tahun 2018 Nomor : 004046/SSPD/06/1/2018 tanggal 29 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Nomor : 003810/SKPD/06/4/2018 tanggal 26 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Slip setoran dengan nomor 015.01.12.000000.1 (1 Lembar);
- 65) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Melati V Tahap II nomor : 11949/BKAD/SP2D-LS/XI/2018 tanggal 22 November 2018 (1 Lembar), beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :402/Pertanian/SPP-LS/XI/2018 tanggal SPP : 13 November 2018 (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran tahap II sebesar 70% pekerjaan DAM Parit Kelompok Tani Melati Desa Mustika Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 13 November 2018 (1 Lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Fatria Ahmad dan Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 14 November 2018 (1 Lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:8768/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:8768/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018 (2 Lembar);

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 402/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (8 Lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 402/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018) tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 402/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018, tanggal 13 November 2018 (1 Lembar);
 - Lembar Kontrol Nomor SPP: 402/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 yang diterima pada tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/402/SPM-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor :127/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
 - Rencana usulan kegiatan 30% (3 Lembar);
 - Buku Tabungan BRI BRITAMA No Rekening : 5151-01-033202-53-0 atas nama kelompok tani melati v (1 Lembar);
- 66) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Melati V Tahap III Nomor : 14138 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar), beserta:
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 nomor SPP : 571/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (1 lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Tahap III tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 150 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 571/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018(2 lembar);
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10290 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10290 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 571/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 571/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III Tanggal 14 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 571/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/571/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 178/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Rencana Usulan Kegiatan 30% ke 2 (total 100%) (3 lembar);
- Cetakan Kode Billing nomor ID Billing 0181 2382 0991 136 (1 lembar);
- Tanda Terima Pajak 548218203 tanggal 12 Desember 2018 (1 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 151 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Nomor : 003312/SKPD/06/4/2018 (1 lembar);
- Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2018 Nomor : 003528/SSPD/06/1/2018 tanggal 10 Desember 2018 (1 lembar);
- Foto Kopi Slip Setoran tanggal 10 Desember 2018 (1 lembar);
- Foto Kopi Buku Rekening Kelompok Tani Melati V (1 lembar);

67) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Perintis II Tahap II nomor : 11536/BKAD/SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 Lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :400/Pertanian/SPP-LS/XI/2018 tanggal SPP : 13 November 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap II sebesar 70% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Perintis II Desa Rojonegoro Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 13 November 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 400/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018, tanggal 13 November 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Fatria Ahmad dan Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 14 November 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:8771/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:8771/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 400/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (8 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 152 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 400/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 400/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 yang diterima pada tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/400/SPM-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :129/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (3 Lembar);
- Buku Tabungan BRI BRITAMA No Rekening : 5151-01-033200-53-8 atas nama kelompok Tani Perintis II (1 Lembar);

68) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Perintis II Tahap III Nomor : 14139/BKAD/SP2-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :580/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 18 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Perintis II Desa Rojonogero Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 18 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 580/Pertanian/SPM-LS/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu,A.Md , Fatria Ahmad dan Syaiful Biladali yang di paraf pada tanggal 18 Desember 2018 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 18 Desember 2018(2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 10395/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 10395/BKAD/SPD-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 580/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 580/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Perintis II Desa Rojonogero Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 18 Desember 2018 (1 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 580/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/580/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 150/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Fotokopi buku tabungan BRI BRITAMA atas nama Kelompok tani Perintis II (1 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (2 Lembar);
- Cetakan kode billing dengan jumlah setoran sebesar Rp. 97.500 (Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 154 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima setoran pajak (MPN Billing) dengan No Resi : 96261-01/2018/816539 sebesar Rp. 97.500 (Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (1 Lembar);
 - Cetakan kode billing dengan jumlah setoran sebesar Rp. 388.500 (Tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (1 Lembar);
 - Tanda terima setoran pajak (MPN Billing) dengan No Resi : 96261-01/2018/816540 sebesar Rp. 388.500 (Tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (1 Lembar);
 - Surat setoran pajak daerah (SSPD) Tahun 2018 Nomor : 003533/SSPD/06/1/2018 tanggal 11 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Nomor : 003316/SKPD/06/4/2018 tanggal 11 Desember 2018 (1 Lembar);
- 69) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Melati III Tahap II Nomor : 11747/BKAD/SP2D-LS/XI/2018 tanggal 19 November 2018 (1 Lembar), beserta :
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :401/Pertanian/SPP-LS/XI/2018 tanggal SPP : 13 November 2018 (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran tahap II sebesar 70% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Melati III Desa Mustika Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 13 November 2018 (1 Lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 401/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018, tanggal 13 November 2018 (1 Lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Fatria Ahmad dan Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 14 November 2018 (1 Lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 8767/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 09 November

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 155 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor :
8767/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 09 November
2018 (2 Lembar);

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
401/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (8
Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa
Nomor : 401/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal
13 November 2018 (2 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 401/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018
yang diterima pada tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor:
900/401/SPM-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (2
Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018
Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 13 November 2018 (2
Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :128/BAP/DISTAN/XI/2018
tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (3 Lembar);
- Buku Tabungan BRI BRITAMA No Rekening : 5151-01-033199-
53-3 atas nama kelompok Tani Melati III (1 Lembar);

70) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Melati III Tahap III
Nomor : 14135/BKAD/SP2-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018
(1 Lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi
Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 570/Pertanian/SPP-
LS/XII/2018 tanggal SPP : 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan
Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Melati III
Desa Mustika Kec. Paguyaman Kab. Boalemo TA.2018 (SD-DAK
REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh
Juta Rupiah) tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 156 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 570/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu,A.Md , Fatria Ahmad dan Syaiful Biladali yang di paraf pada tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 10291/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 10291/BKAD/SPD-LS/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 570/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 570/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 570/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/570/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 179/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (3 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.820.250 (Delapan Ratu Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 157 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Puluh Rupiah), Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi :
96263-02/2018/808181 (2 Lembar);

- SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2018 Nomor :
003527/SSPD/06/1/2018 (1 Lembar);
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Nomor :
003311/SKPD/06/4/2018 Tanggal 10 Desember 2018 (1
Lembar);
- Slip setoran Nomor : 015 01 12 0000001 Tanggal 10 Desember
2018 (1 Lembar);
- Fotokopi Buku Tabungan BRI BRITAMA No rekening 5151-01-
033199-53-3 atas nama Kelompok Tani Melati III (1 Lembar).

71) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Maju Bersama Tahap
II nomor : 11489/BKAD/SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November
2018 (1 Lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi
Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :388/Pertanian/SPP-
LS/XI/2018 tanggal SPP : 09 November 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap II sebesar 70% pekerjaan
Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Maju
Bersama Desa Kuala Lumpur Kec.Paguyaman Kab.Boalemo
TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp
30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 09 November 2018
(1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM :
388/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018, tanggal 09 November 2018
(1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang
diverifikasi oleh Saleh Y.Usu,A.Md dan Fatria Ahmad yang di
paraf pada tanggal 09 November 2018 dan 12 November 2018
(1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 09 November
2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor :
8692/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 08 November

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:
8692/BKAD/SPD-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2
Lembar);

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
388/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 09 November 2018 (8
Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa
Nomor : 388/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal
09 November 2018 (2 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 388/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018
yang diterima pada tanggal 09 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor :
900/388/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 09 November 2018 (2
Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018
Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 09 November 2018 (2
Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :124/BAP/DISTAN/XI/2018
tanggal 09 November 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (3 Lembar).

72) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Maju Bersama Tahap
III Nomor : 12745/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 5 Desember
2018 (1 Lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi
Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :494/Pertanian/SPP-
LS/XII/2018 tanggal SPP : 03 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan
Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Maju
Bersama Desa Kuala Lumpur Kec.Paguyaman Kab.Boalemo
TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp
30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 03 Desember 2018
(1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 159 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 494/Pertanian/SPM-LS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu,A.Md , Fatria Ahmad dan Syaiful Biladali yang di paraf pada tanggal 4 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 4 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 9566/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 30 November 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 9566/BKAD/SPD-LS/XI/2018 tanggal 30 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 494/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 (8 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 494/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 (2 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Maju Bersama Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman Kab. Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 03 Desember 2018 (1 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 494/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 04 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/494/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening : 5.2.2.23.01 tanggal 03 Desember 2018 (2 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 160 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



- Berita Acara Pembayaran Nomor :157/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30 % (3 Lembar);
- Surat setoran pajak daerah (SSPD) Tahun 2018 Nomor : 003128/SSPD/06/1/2018 tanggal 28 November 2018 (1 Lembar);
- Surat tanda setoran no 18 18304 sebesar Rp 91.875 yang diterima pada tanggal 28 November 2018 (2 Lembar);
- Cetakan kode billing dengan jumlah setoran sebesar Rp. 78.000 (Tujuh Puluh delapan ribu rupiah) (1 Lembar);
- Tanda terima setoran pajak (MPN Billing) dengan No Resi : 96263-03/2018/831340 sebesar Rp. 78.000 (Tujuh Puluh delapan ribu rupiah) (1 Lembar);
- Cetakan kode billing dengan jumlah setoran sebesar Rp. 584.250 (Lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) (1 Lembar);
- Tanda terima setoran pajak (MPN Billing) dengan No Resi : 96263-03/2018/831339 sebesar Rp. 584.250 (Lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) (1 Lembar);
- Fotokopi buku tabungan BRI BRITAMA dengan No rekening 5151-01-033201-53-4 atas nama Kelompok tani maju bersama (1 Lembar).

73) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Moropoga jaya I Tahap II Nomor : 11540/BKAD/SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 Lembar), beserta :

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 398/Pertanian/SPM-LS/XI/2018 tanggal SPP : 13 November 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap II sebesar 70% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Moropoga Jaya I Desa Sariپی Kec. Paguyaman Kab. Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 13 November 2018
(1 Lembar);

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 398/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018, tanggal 13 November 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Fatria Ahmad dan Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 14 November 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:8770/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 8770/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 398/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (8 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 398/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 398/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 yang diterima pada tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/398/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 131/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 13 November 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (3 Lembar);
- Buku Tabungan BRI BRITAMA No Rekening : 5151-01-033182-53-6 atas nama kelompok Moropoga jaya I (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 162 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



74) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Moropoga Jaya I
Tahap III Nomor : 14140/BKAD/SP2-LS/XII/2018 tanggal 19
Desember 2018 (1 Lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 576/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 17 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Moropoga Jaya I Desa Saripi Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 17 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 567/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Fatria Ahmad dan Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 18 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 10287/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 10287/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 576/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 576/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018 (2 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III sebesar 100% Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 163 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Moropoga Jaya I Desa saripi Kec. Paguyaman Kab. Boalemo
TA. 2018 tanggal 17 Desember 2018 (1 Lembar);

- Lembar Kontrol Nomor SPP: 576/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/576/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 17 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 185/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 (2 Lembar);
- Buku Tabungan BRI BRITAMA No Rekening : 5151-01-033162-53-6 atas nama kelompok Moropoga jaya I (1 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (2 Lembar);
- Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2018 Nomor : 003270/SSPD/06/1/2018 tanggal 03 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Nomor : 003071/SKPD/06/4/2018 tanggal 03 Desember 2018 (1 Lembar);
- Slip Setoran sebesar Rp. 91.875,- tanggal 03 Desember 2018 (1 Lembar);
- Tanda terima Setoran Pajak tanggal 03 Desember 2018 nomor 739286912 (2 Lembar).

75) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Cahaya Baru Tahap II Nomor : 14640/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:

- Kwitansi Pembayaran tahap II sebesar 70% pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal kelompok tani cahaya baru Desa Mananggu Kec.Mananggu Kab.Boalemo TA. 2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 18 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 588/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Nomor : 10512/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor : 10512/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tanggal 17 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 588/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 588/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Lembar kontrol Nomor SPP: 588/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB LS) Nomor : 900/588/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita acara pembayaran Nomor :190/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (3 Lembar);
- Buku tabungan simpedes atas nama kelompok tani cahaya baru (1 Lembar);

76) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Cahaya Baru Tahap III Nomor : 14982/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 165 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :599/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Cahaya Baru Desa Mananggu Kec.Mananggu Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 599/Pertanian/SPM-LS/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu,A.Md , Fatria Ahmad dan Syaiful Biladali yang di paraf pada tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10513/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 10513/BKAD/SPD-LS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 599/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 599/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Tani Cahaya Baru Desa Mananggu Kec.Mananggu Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 166 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Kontrol Nomor SPP: 599/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor:900/599/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :194/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Cetakan kode billing dengan jumlah setoran sebesar Rp. 855.000 (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) (1 Lembar);
- Tanda terima setoran pajak (MPN Billing) dengan No Resi : 96265-02/2018/816711 sebesar Rp. 855.000 (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) (1 Lembar);
- Fotokopi buku tabungan BRI BRITAMA dengan No rekening 5151-01-033187-53-6 atas nama Kelompok tani cahaya baru (1 Lembar);
- Slip setoran sebesar Rp.91.875 tanggal 17 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat setoran pajak daerah (SSPD) Tahun 2018 Nomor : 003729/SSPD/06/1/2018 tanggal 17 Desember 2018 (1 Lembar).

77) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Sumber Agung Tahap II Nomor : 11508 / BKAD / SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 lembar), beserta :

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 384/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 08 November 2018 (1 lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 384/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 8 November 2018 (1 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 167 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 9 November 2018 (2 lembar);
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 8590 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 6 November 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 8590 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 6 November 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 384/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 8 November 2018 (8 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 384/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 (2 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 8 November 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 384/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/304/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 120/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);
- Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 70%) (1 lembar);
- Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Sumber Agung (1 lembar).

78) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Sumber Agung Tahap III Nomor : 14094/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 168 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :572/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kelompok Sumber Agung Desa Jatimulya Kec.Wonosari Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 572/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu,A.Md dan Fatria Ahmad yang di paraf pada tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10289/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 10289/BKAD/SPD-LS/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 572/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (7 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 572/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP: 572/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/572/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 169 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening : 5.2.2.23.01 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 180/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (1 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.59.500 (Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) (2 Lembar);
- Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96263-03/2018/862809 (1 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.59.500 (Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) (2 Lembar);
- Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96263-03/2018/869811 (1 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.59.500 (Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) (1 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.84.000 (Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) (1 Lembar);
- Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96263-03/2018/802813, Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96263-03/2018/837814,(1 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.84.000 (Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) (2 Lembar);
- Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96263-03/2018/832815, Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96263-03/2018/832816 (1 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.84.000 (Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) (1 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.101.500 (Seratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) (1 Lembar);
- Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96263-03/2018/832817, Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96263-03/2018/832818 (1 Lembar);

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Halaman 170 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) (1Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah) (1 Lembar);
- SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2018 Nomor : 003570/SSPD/06/1/2018, Tanggal 12 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Nomor : 003349/SKPD/06/4/2018, Tanggal 12 Desember 2018 (1 Lembar);
- Fotokopi Buku Tabungan BRI BRITAMA No rekening 5151-01-033982-53-8 atas nama Kelompok Tani Sumber Agung (1 Lembar).

79) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Darma Bakti I Tahap II Nomor : 11490 / BKAD / SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November 2018(1 lembar), beserta :

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 385/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 08 November 2018 (1 lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 385/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 8 November 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 9 November 2018 (2 lembar);
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 8589 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 6 November 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 8589 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 6 November 2018 (1 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 171 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 385/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 8 November 2018 (8 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 385/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 (2 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 08 November 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 385/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/385/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 122/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);
- Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 70%) (1 lembar);
- Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Darma Bakti I (1 lembar).

80) Surat Perintah Pencairan Dana Darma Bakti I Tahap III Nomor : 14890/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (1 Lembar), beserta :

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor 600/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan pembangunan embung kelompok tani darma bakti I Desa Bualo Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah pengajuan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 172 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biladila yang di paraf pada tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);

- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018.2 Lembar
- Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Nomor 10396/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 10396/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 600/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor:600/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018) tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat perintah membayar langsung No .SPM : 600/Pertanian/SPM-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Lembar kontrol No .SPP : 600/Pertanian/SPM-LS/XII/2018 diterima tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB LS) Nomor: 900/600/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian rencana penggunaan dana LS Tahun Anggaran 2018, kode rekening : 5.2.2.23.01 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :195/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Buku rekening tabungan BRI (BRITAMA) no rekening : 515101033218539 atas nama kelompok Tani Darma Bakti I (1 Lembar);

81) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Jurang Asih I Tahap II Nomor : 11517 / BKAD / SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 lembar), beserta :

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 383/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (1 lembar)
- Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 08 November 2018 (1 lembar)
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 383/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 8 November 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 9 November 2018 (2 lembar);
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 8592 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 6 November 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 8592 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 6 November 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 383/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 8 November 2018 (10 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 383/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 (2 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 08 November 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 383/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/383/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 174 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Nomor : 123/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);
- Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 70%) (1 lembar);
- Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Jurang Asih I (1 lembar).

82) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Jurang Asih I Tahap III Nomor : 14889 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (1 lembar), beserta :

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 601/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III sebesar 100% tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018(2 lembar);
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10397 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10397 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 601/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (10 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 601/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 601/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III sebesar 100% Pembangunan Embung Kelompok Tani Jurang Asih I Desa Bualo Kec.

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 175 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paguyaman TA. 2018 Tanggal 19 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);

- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 601/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 diterima tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/601/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 200/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 lembar);
- Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Jurang Asih I dengan nomor rekening 5151-01-033193-53-7 (1 lembar);

83) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Merta Sari II Tahap II Nomor : 11491 / BKAD / SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 lembar), beserta:

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 11491 / BKAD / SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 lembar);
- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 387/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap II tanggal 08 November 2018 (1 lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 387/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 8 November 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 9 November 2018 (2 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 176 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 8588 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 6 November 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 8588 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 6 November 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 387/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 8 November 2018 (8 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 387/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 (2 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap II Tanggal 8 November 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 387/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/387/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 November 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 118/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 05 November 2018 (2 lembar);
- Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 70%) (1 lembar);
- Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Merta Sari II (1 lembar).

84) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Merta Sari II Tahap III Nomor : 14143 / BKAD / SP2-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar), beserta :

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 567/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III sebesar 100% Pekerjaan Perkembangan Embung Kelompok Tani Merta Sari II Desa Tri

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun Kec. Wonosari Kab. Boalemo TA. 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 567/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diverifikasi tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018(2 lembar);
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10295/BKAD/SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10295/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 567/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 567/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III sebesar 100% Pekerjaan Embung Kelompok Tani Merta Sari II Desa Tri Rukun Kec. Wonosari Kab. Boalemo TA. 2018 Tanggal 14 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 567/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 diterima tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/567/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 178 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Usulan Kegiatan 30% Ke 1 (Total 100%) (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setor Rp. 565.500,-(1 Lembar);
- Tanda Terima Setoran Pajak tanggal 06 Desember 2018 nomor 739287453 (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setor Rp. 179.700,-(1 Lembar);
- Tanda Terima Setoran Pajak tanggal 06 Desember 2018 nomor 739287451 (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setor Rp. 671.250,- (1 Lembar);
- Tanda Terima Setoran Pajak tanggal 06 Desember 2018 nomor 739287452 (1 lembar);
- Surat Setoran Pajak Daerah nomor: 03355/SSPD/06/1/2018 tanggal 05 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Ketetapan pajak daerah Nihil Nomor : 003154/SKPD/06/4/2018 tanggal 05 Desember 2018
- Foto kopi buku rekening Kelompok Tani Merta Sari II dengan nomor rekening 5151-01-033192-53-1 (1 lembar).

85) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Maju Bersama Tahap III Nomor : 12406 / BKAD / SP2D-LS/XI/2018 tanggal 30 November 2018 (1 lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 nomor SPP : 415/PPERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III tanggal 16 November 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 415/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 November 2018(2 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 179 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 9090 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 15 November 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 9090 / BKAD / SPD-LS/XI/ 2018 Tahun 2018 tanggal 15 November 2018 (1 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 415/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (8 lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 415/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III Tanggal 16 November 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 415/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/415/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 16 November 2018 (2 lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 15 November 2018 (2 lembar);
- Foto Kopi Buku Rekening Kelompok Tani Maju Bersama (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing ID Billing 0181 1574 4281 436 (1 lembar);
- Tanda Terima Setoran Pajak 739285800 tanggal 28 November 2018 (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing ID Billing 0181 1574 5161 141 (1 lembar);
- Tanda Terima Setoran Pajak 739285801 tanggal 28 November 2018 (1 lembar);
- Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2018 Nomor : 003148/SSPD/06/1/2018 tanggal 29 November 2018 (1 lembar);
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Nomor : 002980/SKPD/06/4/2018 tanggal 29 November 2018 (1 lembar);
- Foto Kopi Slip Setoran tanggal 29 November 2018 (1 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 180 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Pembayaran Nomor : 134/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (2 lembar);
- Rencana Usulan Kegiatan 30% ke 2 (total 100%) (1 lembar).

86) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Mandiri III Tahap II Nomor : 11516/BKAD/SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 Lembar), beserta :

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :386/Pertanian/SPP-LS/XI/2018 tanggal SPP : 08 November 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap II sebesar 70% pekerjaan Pembangunan Embung Kelompok Tani Mandiri III Desa Piloliyanga Kec.Tilamuta Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 08 November 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 386/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018, tanggal 8 November 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y. Usu, A.Md dan Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 09 November 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 8616/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 06 November 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 8616/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 06 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 386/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (8 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 386/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Kontrol Nomor SPP: 386/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 yang diterima pada tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/386/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :119/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (1 Lembar);
- Buku Tabungan BRI BRITAMA No Rekening : 5151-01-033213-53-1 atas nama kelompok Tani Mandiri (2 Lembar).

87) Surat Perintah Pencairan Dana Kelompok Tani Mandiri III Tahap III Nomor : 14095 / BKAD / SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 lembar), beserta :

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 nomor SPP : 566/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 566/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (1 lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018(2 lembar);
- Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 10296 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);
- Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10296 / BKAD / SPD-LS/XII/ 2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (1 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 182 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 566/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 566/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III Tanggal 14 Desember 2018 bermaterai 6000 (1 lembar);
- Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2018 Nomor SPP : 566/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 (2 lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/566/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 175/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 lembar);
- Rencana Usulan Kegiatan 30% ke 2 (total 100%) (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing nomor ID Billing 0181 2019 6336 156 (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing nomor ID Billing 0181 2019 6923 149 (1 lembar);
- Tanda Terima Pajak 739287135 tanggal 03 Desember 2018 dan Tanda Terima Pajak 739287136 tanggal 03 Desember 2018 (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing nomor ID Billing 0181 2019 8123 722 (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing nomor ID Billing 0181 2020 4474 113 (1 lembar);
- Tanda Terima Pajak 739287137 tanggal 03 Desember 2018 dan Tanda Terima Pajak 739287138 tanggal 03 Desember 2018 (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing nomor ID Billing 0181 2020 5026 121 (1 lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 183 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cetakan Kode Billing nomor ID Billing 0181 2020 6055 721 (1 lembar);
- Tanda Terima Pajak 739287139 tanggal 03 Desember 2018 dan Tanda Terima Pajak 739287140 tanggal 03 Desember 2018 (1 lembar);
- Cetakan Kode Billing nomor ID Billing 0181 2020 5423 351 (1 lembar);
- Tanda Terima Pajak 739287141 tanggal 03 Desember (1 lembar);
- Foto Kopi Buku Rekening Kelompok Tani Mandiri III (1 lembar);

88) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Iloheluma IV Tahap II Nomor : 11507/BKAD/SP2D-LS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 (1 Lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 382/Pertanian/SPP-LS/XI/2018 tanggal SPP : 08 November 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap II sebesar 70% pekerjaan pembangunan Dam Parit Kelompok Tani Iloheluma IV Desa Mutiara Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 08 November 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 382/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 09 November 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 08 November 2018 2 Lembar
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 8591/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 06 November 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8591/BKAD/SPD-LS/XI/2018 tanggal 06 November 2018 (2 Lembar);

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 382/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tanggal 08 November 2018 (8 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 382/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP : 382/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 yang diterima pada tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/382/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :121/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 08 November 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (1 Lembar);
- Tabungan BRI BRITAMA No rekening : 5151-01-033191-53-5 atas nama Kelompok Tani Iloheluma IV (1 Lembar).

89) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Iloheluma IV Tahap III Nomor : 14136/BKAD/SP2-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 568/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 04 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan pembangunan Dam Parit Kelompok Tani Iloheluma IV Desa Mutiara Kec.Paguyaman Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 185 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 568/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladali yang di paraf pada tanggal tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 10294/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 10294/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 568/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 568/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III sebesar 100% Pekerjaan Pembangunan Dam Parit Kelompok Tani Iloheluma IV Desa Mutiara Kec. Paguyaman Kab. Boalemo TA. 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPP : 568/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/568/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :176/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 186 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana usulan kegiatan 30% (1 Lembar);
- Tanda Terima Setoran Pajak 548216051 tanggal 10 Desember 2018 (1 Lembar);
- Tanda Terima Setoran Pajak 548216052 tanggal 10 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Setoran Pajak Daerah Nomor : 003515/SSPD/06/1/2018 tanggal 10 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Nomor : 003301/SKPD/06/4/2018 tanggal 10 Desember 2018 (1 Lembar);
- Slip Setoran Nomor 015 01 12 0000001 sebesar 1.886.250,- tanggal 10 Desember 2018 (1 Lembar);
- Tabungan BRI BRITAMA No rekening : 5151-01-033191-53-5 atas nama Kelompok Tani Iloheluma IV (1 Lembar);

90) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Mufakat Tahap II Nomor : 14134/BKAD/SP2-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 579/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 18 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap II sebesar 70% pekerjaan DAM Parit Kelompok Tani Mufakat Desa Mananggu Kec.Mananggu Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 18 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 579/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 18 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 187 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10391/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor : 10391/BKAD/SPD-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:579/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 579/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPM : 579/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/579/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor :186/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 70% (1 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.727.500 (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96265-02/2018/816714 (2 Lembar);
- Buku Tabungan BRI BRITAMA No Rekening : 5151-01-033995-53-1 atas nama kelompok tani mufakat (1 Lembar).

91) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Mufakat Tahap III Nomor : 14892/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 588/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 18 Desember 2018 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 188 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan DAM Parit Kelompok Tani Mufakat Desa Mananggu Kec.Mananggu Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 10390/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor : 10390/BKAD/SPD-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 589/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (12 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 589/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 589/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPM:589/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/589/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Halaman 189 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Pembayaran Nomor :191/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (1 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.727.500 (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96265-02/2018/816714 (2 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.892.500 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96265-02/2018/816715 (2 Lembar);
- SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun 2018 Nomor : 003728/SSPD/06/1/2018 Tanggal 17 Desember 2018 (1 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.57.000 (Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah), Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96265-02/2018/816712 (2 Lembar);
- Cetakan Kode Billing dengan jumlah setoran sebesar Rp.60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah), Tanda Terima Setoran Pajak dengan No Resi : 96265-02/2018/816713 (2 Lembar).

92) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Iloponu Tahap II Nomor : 11954/BKAD/SP2D-LS/XI/2018 tanggal 22 November 2018 (1 Lembar), beserta :

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :413/Pertanian/SPP-LS/XI/2018 tanggal SPP : 16 November 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap II sebesar 70% pekerjaan DAM Parit Kelompok Tani Iloponu Desa Tanjung Harapan Kec.Wonosari Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 16 November 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biladila yang di paraf pada tanggal 19 November 2018 (1 Lembar);

- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:9089/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 15 November 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:9089/BKAD/SPD-LS/XII/2018 tanggal 15 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 413/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (8 Lembar).
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 413/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 16 November 2018 (2 Lembar).
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM : 413/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (1 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPM:413/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 yang diterima pada tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/413/SPM-LS/XII/2018 tanggal 16 November 2018 (2 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 16 November 2018 (2 Lembar);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 145/BAP/DISTAN/XI/2018 tanggal 16 November 2018. (2 Lembar);
- Rencana usulan kegiatan 30% (1 Lembar);
- Buku Tabungan BRI BRITAMA No Rekening : 5151-01-033186-53-0 atas nama kelompok tani iloponu (1 Lembar).

93) Surat perintah pencairan dana Kelompok Tani Iloponu Tahap III Nomor : 14078/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar), beserta:

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Halaman 191 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :569/Pertanian/SPP-LS/XI/2018 tanggal SPP : 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran tahap III sebesar 100% pekerjaan DAM Parit Kelompok Tani Iloponu Desa Tanjung Harapan Kec.Wonosari Kab.Boalemo TA.2018 (SD-DAK REGULER PERTANIAN) sebesar Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM : 569/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladila yang di paraf pada tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 10292/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:10292/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018. (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 569/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 10292/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 (10 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor: 569/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran Tahap III sebesar 100% Pekerjaan Pembangunan Dam Parit Kelompok Tani Iloponu Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo TA. 2018 tanggal 14 Desember 2018 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 192 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Kontrol Nomor SPM:569/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor: 900/564/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening :5.2.2.23.01 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor :177/BAP/DISTAN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (2 Lembar);
 - Rencana usulan kegiatan 30% (1 Lembar);
 - Slip setoran nomor 015 01 12 0000001 tanggal 6 Desember 2018(1 Lembar);
 - Buku Tabungan BRI BRITAMA No Rekening : 5151-01-033186-53-0 atas nama kelompok tani iloponu (1 Lembar);
 - Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2018 Nomor 003393/SSPD/06/1/2018 tanggal 06 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Nomor : 003190/SKPS/06/4/2018 Tanggal 06 Desember 2018 (1 Lembar);
 - Tanda terima setoran pajak tanggal 06 Desember 2018 nomor 739287307 dan 739287304 (1 Lembar);
 - Tanda terima setoran pajak tanggal 06 Desember 2018 nomor 739287312 dan 739287313 (1 Lembar);
 - Tanda terima setoran pajak tanggal 06 Desember 2018 nomor 739287308 dan 739287309 (1 Lembar);
 - Tanda terima setoran pajak tanggal 06 Desember 2018 nomor 739287310 dan 739287311 (1 Lembar);
 - Tanda terima setoran pajak tanggal 06 Desember 2018 nomor 739287305 dan 739287306 (1 Lembar).;
- 94) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) TA. 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo tanggal 02 Oktober 2018;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 193 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Nomor: 46 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018;
- 96) 9 (sembilan) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 04 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;
- 97) 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 46 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 04 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di lingkungan SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;
- 98) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Pada Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Nomor : 37 Tahun 2018 Tentang Penetapan Koordinator Lapangan / Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Tingkat Kabupaten Pada Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;
- 99) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 231 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 4 Tahun 2018 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 194 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018;

- 100) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Nomor : 39 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Fasilitator Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;
- 101) 6 (enam) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Nomor : 38.a Tahun 2018 Tentang Honor Tim Fasilitator Jasa Perencanaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan (DAU) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;
- 102) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Nomor : 39.a Tahun 2018 Tentang Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Embung Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;
- 103) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Nomor : 39.c Tahun 2018 Tentang Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Dam Parit Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Agustus 2018 beserta lampiran;
- 104) 6 (enam) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Nomor : 39.e Tahun 2018 Tentang Honor Tim Fasilitator Jasa Pengawasan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;
- 105) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Nomor : 39.b Tahun 2018 Tentang Honor Tim

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitator Pengawasan Pembangunan Embung Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;

106) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Nomor : 39.d Tahun 2018 Tentang Honor Tim Fasilitator Pengawasan Pembangunan Dam Parit Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran;

107) Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA 2018 Nomor : 15024/BKAD/SP2-L5/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018, beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :618/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 20 Desember 2018 (1 Lembar);
- Kwitansi PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN IRIGASI AIR TANAH DANGKAL TA 2018 sebesar Rp.39.910.000 tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladili yang di paraf pada tanggal 21 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 21 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 10223/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor : 10223/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018. (3 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 618/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (5 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 196 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 618/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPM:618/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 21 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah membayar langsung Nomor SPM : 618/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (1Lembar);
- Surat Pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB LS) Nomor : 900/618/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor:38.a Tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 (6 Lembar);
- Besaran Honor Tim Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal Nomor 38.a tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 (1 Lembar);
- Surat permohonan 100% tanggal 20 Desember 2018 (1Lembar),
- Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal (Ketua) Rp 1.150.000/Kelompok ,Rp.14.950.000 untuk 13 Kelompok tanggal 20 Desember 2018 atas nama Helmi Ningo, ST;
- Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal (Sekertaris) Rp 800.000/Kelompok ,Rp.10.400.000 untuk 13 Kelompok tanggal 20 Desember 2018 atas nama YULI PURWANTI SAPTANINGTIAS NG, ST;
- Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal (Anggota) Rp 560.000/Kelompok ,Rp.7.280.000 untuk 13 Kelompok tanggal 20 Desember 2018 atas nama ABDULRASYID AYUB. ST;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 197 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal (Anggota) Rp 560.000/Kelompok ,Rp.7.280.000 untuk 13 Kelompok tanggal 20 Desember 2018 atas nama SADAM DJIBU;
- Pengguna Anggaran atas nama Helmi Ningo ST,Yuli Purwanti Saptaningtias Ng, SP, Abdulrasyid Ayub ST, Sadam Djibu; (1 Lembar);

108) Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA 2018 Nomor : 14557/BKAD/SP2-L5/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 569/Pertanian/SPP-LS/XI/2018 tanggal SPP : 14 Desember 2018 (1 Lembar);
- Daftar Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 619/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladili yang di paraf pada tanggal 21 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 21 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 10224/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor : 10224/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018. (3 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 619/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (5 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 198 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Belanja Konsultasi Pengawasan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal TA 2018 sebesar 34.970.000 tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);
- Lembar Kontrol Nomor SPM : 619/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 21 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah membayar langsung Nomor SPM : 619/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (1Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB LS) Nomor : 900/619/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat permohonan 100% (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal (Ketua) Rp 1.000.000/Kelompok ,Rp.13.000.000 untuk 13 Kelompok tanggal 20 Desember 2018 atas nama FIKRIYANTO DJIBU;
- Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal (Sekertaris) Rp 690.000/Kelompok ,Rp.8.970.000 untuk 13 Kelompok tanggal 20 Desember 2018 atas nama HIRAWATI BOLOTA, S.Ap;
- Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal (Anggota) Rp 500.000/Kelompok ,Rp.6.500.000 untuk 13 Kelompok tanggal 20 Desember 2018 atas nama WARJON AHMAD, S.Kom;
- Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal (Anggota) Rp 500.000/Kelompok ,Rp.6.500.000 untuk 13 Kelompok tanggal 20 Desember 2018 atas nama IDRIS DJIBU;
- Pengguna Anggaran atas nama Fikriyanto Djibu, Hirawati Bolota, S.Ap, Warjon Ahmad, S.Kom, Idris Djibu; (1 Lembar)
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak tanggal 20 Desember 2018;
- Keputusan Kepala Dinas Nomor:39.c Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 (5 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 199 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besaran Honor Tim Fasilitator Pengawasan Irigasi Air Tanah Dangkal tanggal 20 Agustus 2018 (1 Lembar);
- 109) Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Embung TA.2018. (SD-DAK REGULER PERTANIAN) Nomor : 12320/BKAD/SP2D-LS/XI/2018 tanggal 28 November 2018, beserta:
 - Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :417/Pertanian/SPP-LS/XI/2018 tanggal SPP : 16 November 2018 (1 Lembar);
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 417/PERTANIAN/SPM-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (1Lembar);
 - Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladili yang di paraf oleh Fatria Ahmad dan Syaiful Biladili pada tanggal 22 November 2018 dan 26 November 2018 (1 Lembar);
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 26 November 2018 (2 Lembar);
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 9093/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 15 November 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor : 9093/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 15 November 2018. (2 Lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 417/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (4 Lembar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 417/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Belanja Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Dam Parit TA.2018 sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah). (SD-

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 200 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAK REGULER PERTANIAN) tanggal 16 November 2018 (1 Lembar);
- Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor:900/417/SKTJM/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (1 Lembar);
 - Rekomendasi atas nama SOFYAN HASAN, STP, MM tanggal 16 November 2018;
 - Lembar Kontrol Nomor SPM:417/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 yang diterima pada tanggal 26 November 2018 (1 Lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/417/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (1Lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 16 November 2018 (1 Lembar);
 - Daftar Pembayaran Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Embung Tahun Anggaran 2018 Bulan November 2018 (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Honor Ketua Fasilitator Sebesar Rp.5.500.000,00 atas nama Helmi Ningo. ST, Kwitansi Pembayaran Honor Sekertaris Fasilitator Sebesar Rp.4.500.000,00 atas nama Yuli Purwanti Sataningtias NG.SP (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Honor Anggota Fasilitator Sebesar Rp.4.000.000,00 atas nama Aslan Ismail, Kwitansi Pembayaran Honor Anggota Fasilitator Sebesar Rp.4.000.000,00 atas nama Sadam Djibu (1 Lembar);
 - NPWP : 64.131.893.6-822.000 atas Nama Helmi Ningo (1Lembar);
 - Buku rekening Tabungan BRI SIMPEDES dengan Nomor :5151-01-026200-53-9 atas nama Helmi Ningo (1 Lembar);
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor:39.a Tahun 2018 Tentang Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Embung Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 201 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Agustus 2018 (5 Lembar);

- Besaran Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Dam Parit Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 (1 Lembar);

110) Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Dam Parit TA.2018. (SD-DAK REGULER PERTANIAN) nomor : 12321/BKAD/SP2D-LS/XI/2018 tanggal 28 November 2018, beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :416/Pertanian/SPP-LS/XI/2018 tanggal SPP : 16 November 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladili yang di paraf oleh Fatria Ahmad dan Syaiful Biladili pada tanggal 22 November 2018 dan 26 November 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 26 November 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 9092/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 15 November 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor : 9092/BKAD/SPD-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 15 November 2018. (2 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 416/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (4 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 416/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 (1Lembar);
- Kwitansi Pembayaran Belanja Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Dam Parit TA.2018

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 202 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). (SD-DAK REGULER PERTANIAN) tanggal 16 November 2018 (1 Lembar);
- Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor:900/416/SKTJM/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (1Lembar);
 - Rekomendasi atas nama SOFYAN HASAN, STP, MM tanggal 16 November 2018;
 - Lembar Kontrol Nomor SPM:416/PERTANIAN/SPP-LS/XI/2018 yang diterima pada tanggal 26 November 2018 (1 Lembar);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/416/SPTB-LS/XI/2018 tanggal 16 November 2018 (1Lembar);
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 16 November 2018 (1 Lembar);
 - Daftar Pembayaran Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Dam Parit Tahun Anggaran 2018 Bulan November 2018 (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Honor Ketua Fasilitator Sebesar Rp.8.500.000,00 atas nama Helmi Ningo. ST, Kwitansi Pembayaran Honor Sekertaris Fasilitator Sebesar Rp.7.500.000,00 atas nama Yuli Purwanti Sataningtias NG.SP (1 Lembar);
 - Kwitansi Pembayaran Honor Anggota Fasilitator Sebesar Rp.6.500.000,00 atas nama Aslan Ismail, Kwitansi Pembayaran Honor Anggota Fasilitator Sebesar Rp.6.500.000,00 atas nama Sadam Djibu (1 Lembar);
 - NPWP : 64.131.893.6-822.000 atas Nama Helmi Ningo (1Lembar);
 - Buku rekening Tabungan BRI SIMPEDES dengan Nomor :5151-01-026200-53-9 atas nama Helmi Ningo (1 Lembar);
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor:39.c Tahun 2018 Tentang Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Dam Parit Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 203 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Agustus 2018 (5 Lembar);

- Besaran Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Dam Parit Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 (1 Lembar);

111) Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Honor Tim Fasilitator Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Embung TA.2018. (SD-DAK REGULER PERTANIAN) Nomor : 14670/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP :592/Pertanian/SPP-LS/XII/2018 tanggal SPP : 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 592/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diverifikasi oleh Saleh Y.Uсу, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladili yang di paraf pada tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember 2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor:10285/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor : 10285/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018. (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak Nomor : 900/591/Distan/SPTJW/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (1Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 592/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (5 Lembar);

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 204 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor : 592/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 (1Lembar);
- Kwitansi Pembayaran Belanja Honor Tim Fasilitator Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Embung TA.2018 sebesar Rp.21.659.000,- (Dua puluh satu juta enam ratus lima puluh Sembilan juta rupiah). (SD-DAK REGULER PERTANIAN) tanggal 19 November 2018 (1 Lembar);
- Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 900/591/DISTAN/SKTJM/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1Lembar);
- Rekomendasi atas nama SOFYAN HASAN, STP, MM tanggal 19 Desember 2018;
- Lembar Kontrol Nomor SPM:592/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/592/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Daftar Pembayaran Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Embung Tahun Anggaran 2018 Bulan Desember 2018 (1 Lembar);
- NPWP : 75.739.983.7-822.000 atas Nama Fikriyanto Djibu (1Lembar);
- Buku rekening Tabungan Mandiri dengan Nomor :150-00-1210488-9 atas nama Fikriyanto Djibu (1 Lembar);
- Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor:39.b Tahun 2018 Tentang Honor Tim Fasilitator Pengawasan Pembangunan Embung Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Agustus 2018 (5 Lembar);
- Besaran Honor Tim Fasilitator Perencanaan Dan Tim Pengawasan Embung Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 205 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian/ Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten
Boalemo Tahun Anggaran 2018 (1 Lembar);

112) Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Belanja Honor Tim
Fasilitator Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Dam Parit
TA.2018. (SD-DAK REGULER PERTANIAN) Nomor :
14654/BKAD/SP2D-LS/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018,
beserta:

- Daftar Uji Kelengkapan Lampiran Dokumen Organisasi
Perangkat Daerah Tahun 2017 Nomor SPP : 591/Pertanian/SPP-
LS/XII/2018 tanggal SPP : 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM:
591/PERTANIAN/SPM-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018
(1Lembar);
- Naskah Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang
diverifikasi oleh Saleh Y.Usu, A.Md, Fatria Ahmad, Syaiful Biladili
yang di paraf pada tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 19 Desember
2018 (2 Lembar);
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor :
10286/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13
Desember 2018, Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor :
10286/BKAD/SPD-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 13
Desember 2018. (2 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor:
900/591/Distan/SPTJW/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018
(1Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
591/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018
(5 Lembar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa
Nomor : 591/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 Tahun 2018 tanggal
19 Desember 2018 (1Lembar);
- Kwitansi Pembayaran Belanja Honor Tim Fasilitator Pengawasan
Pekerjaan Pembangunan Dam Parit TA.2018 sebesar

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 206 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). (SD-DAK REGULER PERTANIAN) tanggal 19 November 2018 (1 Lembar);

- Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 900/591/DISTAN/SKTJM/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1Lembar);
- Rekomendasi atas nama SOFYAN HASAN, STP, MM tanggal 19 Desember 2018;
- Lembar Kontrol Nomor SPM:591/PERTANIAN/SPP-LS/XII/2018 yang diterima pada tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/591/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 (1Lembar);
- Rincian Rencana Penggunaan Dana LS Tahun Anggaran 2018 tanggal 19 Desember 2018 (1 Lembar);
- Daftar Pembayaran Honor Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Dam Parit Tahun Anggaran 2018 Bulan Desember 2018 (1 Lembar);
- Buku rekening Tabungan Mandiri dengan Nomor :150-00-1210488-9 atas nama Fikriyanto Djibu (1 Lembar);
- NPWP : 75.739.983.7-822.000 atas Nama Fikriyanto Djibu (1Lembar);
- Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor:39.d Tahun 2018 Tentang Honor Tim Fasilitator Pengawasan Pembangunan Dam Parit Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Agustus 2018 (5 Lembar);
- Besaran Honor Tim Fasilitator Perencanaan dan Tim Pengawasan Dam Parit Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 (1 Lembar);

113) 1 (satu) Bundel Daftar Berita Acara Penyerahan Asset Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 dan Surat Pernyataan Kesanggupan Menjaga,

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 207 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memelihara Serta Memanfaatkan Asset Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018;

114) 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Kegiatan Dak Bidang Pertanian Tahun 2018;

115) 1 (satu) Bundel Laporan Tim Fasilitator Perencana Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Penyediaan Sarana Peroduksi Pertanian/Perkebunan Pekerjaan Embung Lokasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018;

116) 1 (satu) Bundel Laporan Tim Fasilitator Perencana Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Penyediaan Sarana Peroduksi Pertanian/Perkebunan Pekerjaan Dam Parit Lokasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018;

117) 1 (satu) Bundel Laporan Fasilitator Pekerjaan Dam Parit, Embung dan Irigasi Air Tanah Dangkal Pada Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018; dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo;

118) Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rup iah);

119) Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

120) Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

121) Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

122) Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

123) Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PNGto tanggal 25 November 2020, dan permintaan banding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 208 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pula telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 27 November 2020, dan permintaan banding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Desember 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 8 Desember 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat permintaan bantuan pemberitahuan/ penyerahan memori banding kepada Pengadilan Negeri Limboto perkara pidana Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto Nomor : W20.Ul/3838/HT.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding namun hanya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal yang menyatakan:

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum, masing masing tanggal 1 Desember 2020 dan tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyampaikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 209 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gorontalo telah tidak tepat dalam menerapkan hukum dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dengan alasan:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa keseluruhan unsur dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam hal-hal yang memberatkan pemidanaan bagi Terdakwa sama sekali tidak mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi dengan mengambil hak-hak para kelompok tani dalam Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018, yang mana seharusnya Terdakwa sebagai Aparatur Pemerintahan bahkan sebagai Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Boalemo yang bertugas melayani masyarakat justru bertindak sebaliknya dengan bertindak arogan mengambil hak rakyat yang sangat membutuhkan demi kepentingan pribadi atau;
- Bahwa Terdakwa merupakan actor intelektual dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018, itu dibuktikan dengan alat bukti yang dihadirkan pada proses pemeriksaan Pengadilan, yang secara nyata Terdakwa Selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Boalemo memerintahkan Saksi DANAR BATA,S.TP (Terdakwa dalam berkas yang berbeda) untuk memungut/memotong sejumlah uang atas bantuan yang diterima oleh Kelompok Tani, dimana Terdakwalah yang harusnya memastikan bantuan yang diterima oleh kelompok tani benar-benar sampai sebagaimana mestinya, namun Terdakwa memanfaatkan hal

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 210 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk mendapat keuntungan baik untuk diri pribadi maupun orang lain;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sebelum menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa pula telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang terdapat pada diri Terdakwa selama persidangan dimana perbuatan Terdakwa telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, hal tersebut seharusnya menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman yang setimpal sehingga penjatuhan hukuman pidana penjara atas diri Terdakwa dapat memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) karena dapat menyengsarakan hidup bangsa dan negara serta Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan manifestasi dari keinginan rakyat melalui wakil rakyat yang telah bersama-sama dengan Pemerintah dalam membuat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya telah menyatakan yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan tepat dan benar sehingga memori banding Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara Pemeriksaan oleh Penyidik, berita acara di persidangan serta surat-surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto, tanggal 20 November 2020, serta setelah mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mendapatkan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo mendapatkan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal, Pengadaan Pipa dan perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit dengan anggaran sejumlah Rp.

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 211 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.759.159.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2018;

- Bahwa yang terlibat dalam mengelola penggunaan anggaran tersebut terdiri dari : Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP.,MM., selaku Pengguna Anggaran (PA), saksi HENDRA ABDULLAH selaku PPTK hingga April 2018 yang dilanjutkan oleh I WAYAN SUDIRTA selaku PPTK selama 2 bulan, yang dilanjutkan oleh saksi HANRIYADI, S.TP dan saksi RATNA NOVIANA NANGO selaku Bendahara Pengeluaran, saksi RUSYONO SALIKO, ISMET LIHAWA, ST., INEKE HAMBALI, S.TP.,M.Si, SYAIFUL BILADALI, S.AP., selaku Tim Teknis dan FIKRIYANTO DJIBU, selaku Fasilitator Pengawasan dan Para Kelompok Tani Penerima Bantuan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal, Pembangunan Embung dan Kelompok Tani Penerima Bantuan Dam Parit;
- Bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah dangkal dan Pengadaan Pipa dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit tersebut anggarannya sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan besaran jumlah anggaran yang berbeda yaitu untuk Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal, pengadaan pipa dan perlengkapannya anggarannya ditentukan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per lokasi Kelompok Tani, untuk Pembangunan Embung anggarannya ditentukan sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per lokasi Kelompok Tani dan untuk pembangunan Dam Parit Anggarannya ditentukan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per Lokasi Kelompok Tani;
- Bahwa setelah para calon penerima bantuan mengajukan proposal kepada Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo lalu dilakukan Survey oleh saksi HANDRIYADI selaku PPTK, RUSONO SALIKO selaku Tim Teknis, FIKRYANTO DJIBU selaku Fasilitator, terhadap lokasi calon Kelompok Tani Penerima Bantuan selanjutnya Bupati Kabupaten Boalemo menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak Kerja sama antara Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP.,MM., selaku PA dengan para Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa adapun Kelompok Tani Penerima Bantuan sebagai berikut:

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 212 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Tani penerima bantuan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal dan Pengadaan Pipa Air dan Perlengkapannya terdiri dari 14 lokasi Kelompok Tani dengan anggaran masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per lokasi kelompok tani sebagai berikut:

- a. Kelompok Tani Berkat di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/56/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Berkat Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- b. Kelompok Tani Cahaya Baru di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/55/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Cahaya Baru Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- c. Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/65/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Mananggu Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- d. Kelompok Tani Mekar Wangi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/54/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Mekar

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 213 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wangi Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

- e. Kelompok Tani Jaya Makmur di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/52/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Jaya Makmur Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- f. Kelompok Tani Melati III di Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/62/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Melati III Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- g. Kelompok Tani Melati V di Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/65/SPK/DISTAN-PSP-D AK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Melati V Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- h. Kelompok Tani Maju Bersama di Desa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/64/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Maju Bersama Tentang Pelaksanaan

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 214 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

- i. Kelompok Tani Sri Tani I di Desa Bongo IV Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/60/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Sri Tani I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- j. Kelompok Tani Karya Bersama di Desa Permata Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/58/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Karya Bersama Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- k. Kelompok Tani Ingin Hidup III di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/63/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Ingin Hidup III Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- l. Kelompok Tani Cipta Karya I di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/57/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Cipta Karya I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 215 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Kelompok Tani Perintis II di Desa Rejonegoro Kecamatan Paguyaman Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/59/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Perintis II Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- n. Kelompok Tani Moropoga Jaya I di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/61/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Moropoga Jaya I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
2. Kelompok Tani penerima bantuan Pembangunan Embung terdiri dari 6 lokasi Kelompok tani, masing-masing Kelompok Tani mendapatkan bantuan sebesar Rp. 120.000.000,- sebagai berikut:
- a. Kelompok Tani Sumber Agung di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/43/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Sumber Agung Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- b. Kelompok Tani Merta Sari II di Desa Tri Rukun Wonosari Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/44/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Merta Sari II

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 216 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 216



Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;

- c. Kelompok Darma Bakti I di Desa Bualo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/45/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Darma Bakti I Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- d. Kelompok Jurang Asih I di Desa Bualo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/46/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Jurang Asih I Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- e. Kelompok Tani Maju Bersama di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/47/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Maju Bersama Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- f. Kelompok Tani Mandiri III di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/48/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Mandiri III Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Embung melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018.
3. Kelompok Tani penerima bantuan Pembangunan Dam Parit terdapat 3 Kelompok Tani, masing-masing Kelompok Tani mendapatkan

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sebesar Rp. 150.0000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:

- a. Kelompok Tani Iloheluma IV di Desa Mutiara Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/50/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Iloheluma IV Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dam Parit melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
 - b. Kelompok Tani Iloponu di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/51/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Iloponu Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dam Parit melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
 - c. Kelompok Tani Mufakat di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 520/49/SPK/DISTAN-PSP-DAK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dengan Kelompok Tani Mufakat Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dam Parit melalui Model Swakelola Padat Karya Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa seluruh anggaran tersebut telah dicairkan seluruhnya kepada masing-masing kelompok tani penerima bantuan sebagaimana disebutkan diatas yang mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap yaitu Tahap Pertama sebesar 40% dan tahap II sebesar 30% dan Tahap III sebesar 30% yang ditransfer kerekening penerima bantuan, administrasi pencairannya dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dananya dibantu pembuatannya oleh saksi FIKRYANTO DJIBU;

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Halaman 218 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan rapat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, yang dipimpin oleh Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP.,MM., selaku PLT. dan selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dan sekaligus selaku PA (Pengguna Anggaran) dengan para Ketua dan Bendahara Kelompok tani Penerima Bantuan yang dihadiri juga FIKRIYANTO DJIBU selaku Fasilitator dan saksi HANDRYADI selaku PPTK dan saksi RUSYONO SALIKU selaku Tim Teknis;
- Bahwa pada rapat tersebut Terdakwa SOFIAN HASAN, S.TP.,MM., menyampaikan agar para Kelompok Tani memberikan ucapan terima kasih berupa fee sebesar 10% sampai 15% dari nilai kontrak apabila pekerjaan telah selesai dan pada rapat tersebut saksi FIKRIYANTO JIBU menyampaikan agar dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Air tanah Dangkal dan Pengadaan Pipa dan Perlengkapannya bekerjasama dengan saksi FIKRIYANTO DJIBU selaku Fasilitator;
- Bahwa selanjutnya saksi FIKRIYANTO JIBU mengundang para Ketua dan Bendahara Kelompok Tani Penerima Bantuan/manfaat Bantuan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal dan Pengadaan pipa dan perlengkapannya kerumah saksi FIKRIYANTO JIBU dalam pertemuan mana saksi FIKRIYANTO JIBU menyampaikan kepada para Ketua Kelompok Tani yang hadir agar terdapat kesamaan dalam pekerjaan maka saksi FIKRIYANTO DJIBU meminta sebagian pekerjaan Pembangunan Air Tanah Dangkal dan Pengadaan Pipa dan perlengkapannya dikerjakan oleh saksi FIKRIYANTO JIBU, selanjutnya terdapat kesepakatan bahwa saksi FIKRIYANTO DJIBU yang mengerjakan Sebagian pekerjaan yaitu untuk pengeboran, pengadaan pipa dan perlengkapannya;
- Bahwa terdapat 12 (dua belas) Kelompok Tani Penerima Bantuan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal menyerahkan sebagian pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkan dan pengadaan pipa berikut perlengkapannya kepada saksi FIKRYANTO JIBU dengan nilai pekerjaan seluruhnya hingga senilai Rp. 449.770.000,00,-(empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) jumlah uang mana diberikan untuk biaya pekerjaan pengeboran, pengadaan

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



pipa, pengadaan selang distribusi, selang hisap, mesin pompa, dynamo, pengadaan kabel, pembelian mesin alcon, pembelian kusen dan saksi FIKRIYANTO JIBU telah mengerjakan pekerjaan tersebut dengan jumlah biaya yang berbeda-beda dan pengadaan alat yang berbeda;

- Bahwa kedua belas Kelompok Tani yang menyerahkan biaya untuk sebagian dari pekerjaan Pembangunan Air tanah Dangkal dan Pengadaan Pipa dan Perlengkapannya tersebut yang diserahkan pada setiap tahap pencairan, yaitu setelah pencairan Tahap I 40%, Tahap II 30% dan tahap III 30%, antara lain:

- a. Kelompok Tani Berkat menyerahkan sebesar Rp. 17.000.000,00,-;
- b. Kelompok Tani Cahaya Baru menyerahkan sebesar Rp. 9.500.000,00,-;
- c. Kelompok Tani Mekar Wangi menyerahkan sebesar Rp. 60.000.000,00;
- d. Kelompok Tani Jaya Makmur menyerahkan sebesar Rp. 50.000.000,00,-;
- e. Kelompok Tani Melati III Rp. 21.200.000,00,-;
- f. Kelompok Tani Melati V menyerahkan sebesar Rp. 21.200.000,00,-;
- g. Kelompok Tani Maju Bersama menyerahkan sebesar Rp. 56.170.000,00;
- h. Kelompok Tani Sri Tani menyerahkan sebesar Rp. 157.000.000,00;
- i. Kelompok Tani Karya Bersama menyerahkan sebesar Rp. 18.000.000,00;
- j. BPP Kec. Mananggu menyerahkan sebesar Rp. 100.000.000,00
- k. Kelompok Tani Cipta Karya menyerahkan sebesar Rp. 18.500.000,00;
- l. Kelompok Tani Perintis menyerahkan sebesar Rp. 21.200.000,00;

- Bahwa dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh saksi FIKRIYANTO DJIBU tersebut saksi FIKRIYANTO DJIBU telah menyerahkan uang kepada saksi DANAR BATA, S.TP., untuk diserahkan kepada Terdakwa

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



sebesar Rp. 37.550.000,-(Tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut saksi FIKRYANTO JIBU uang tersebut berasal dari keuntungannya dari pekerjaan pengeboran, pengadaan pipa, selang distribusi, selang hisap, mesin pompa, dynamo, pengadaan kabel, pembelian mesin alcon, pembelian kusen senilai Rp.449.770.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas penerimaan tersebut saksi DANAR BATA, S.TP., melaporkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta saksi DANAR BATA, S.TP., menyimpan dulu uang tersebut;

- Bahwa menurut saksi DANAR BATA, S.TP., atas perintah Terdakwa uang sebesar Rp. 37.550.000,00 (Tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah digunakan untuk membantu pembelian material Mesjid dan perbaikan Aula Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, namun Terdakwa membantah;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi DANAR BATA, S.TP untuk menerima fee sebesar 10% sampai dengan 15 % dari Para Kelompok Tani pada saat pencairan tahap III, yang menurut Terdakwa, Terdakwa tidak meminta fee 10% hingga 15% hanya meminta uang rokok dan biaya pembuatan SPJ;
- Bahwa pada saat pencairan Tahap III para Ketua dan Bendahara Kelompok Tani menyerahkan uang yang berasal dari Anggaran Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal dan Pengadaan Pipa dan Perlengkapannya, Pembangunan Embung,Pembangunan Dam Parit TA 2018 hingga sejumlah Rp. 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi DANAR BATA, S.TP;
- Bahwa saksi Rustam Ahmad., Ketua Kelompok Tani Melati III, bersama saksi Haris Limbotu selaku Bendahara Kelompok Tani Melati III telah menyerahkan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada DANAR BATA di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo .dan uang tersebut merupakan fee dari Kelompok Tani Melati III sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan fee dari Kelompok Tani Melati V sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)”;
- Bahwa saksi Anak Agung Balik, Ketua kelompok tani Sri Tani I menerangkan “saksi DANAR BATA menyampaikan 10 % dari bantuan

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami terima namun saya tidak sanggup dan saya hanya memberikan sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)”,;

- Bahwa saksi Harim Ismail, Kelompok Tani Maju Bersama Pembangunan Irigasi tanah dangkal memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”,;
- Bahwa kemudian saksi Harton Alhabsi, Ketua Kelompok Tani Karya Bersama yang mendapatkan bantuan Pembangunan Irigasi tanah dangkal, menerangkan “saksi DANAR BATA menyampaikan 10 % dari bantuan yang kami terima namun saya tidak sanggup dan saya hanya memberikan sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)”,;
- Bahwa saksi Ismail Hilahapa alias Podu alias Dembe, Ketua Kelompok Tani Ingin Hidup III yang mendapat bantuan Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal beserta Pengadaan Pompa Air dan Perlengkapannya, saksi memberikan uang Rp. 4.000.000,00 (Empat juta Rupiah) dan diterima oleh DANAR BATA,;
- Bahwa kemudian saksi Sarifudin Daima menerangkan saksi beserta Ramin Taku selaku Bendahara Kelompok Tani menuju ke kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo untuk bertemu dengan DANAR BATA, lalu sesampainya disana saksi menyerahkan uang fee sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada DANAR BATA,;
- Bahwa kemudian kemudian saksi Aswin Tadu alias Mini, Ketua Kelompok Tani Cipta Karya I yang mendapatkan bantuan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal beserta Pengadaan Pompa Air dan Perlengkapannya, menerangkan “saya memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada DANAR BATA selaku Kepala Seksi di Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo berdasarkan permintaan komitmen fee sebelumnya karena saat pengarahannya ada yang sindir-sindir mengenai fee 10% dan 15%”,;
- Bahwa kemudian saksi I Wayan Mudita, Ketua kelompok Tani Darma Bakti I menerangkan “DANAR BATA meminta uang potongan (fee) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun kami menawarkan kepada DANAR BATA dengan alasan pekerjaan kami masih berjalan dan

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 222 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan dana, sehingga kami hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada DANAR BATA”;

- Bahwa kemudian saksi I Wayan Sudarmawan, Ketua kelompok Jurang Asih I, yang menerangkan “kami pergi ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo untuk menemui DANAR BATA dan menyerahkan uang yang diminta sebesar 10% tersebut, akan tetapi saya hanya memberikan Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)”;
- Bahwa selanjutnya saksi Iwan Ahmad, selaku Ketua kelompok Iloheluma IV yang mendapat bantuan pembangunan Dam Parit saksi memberikan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada DANAR BATA karena 10% terlalu besar dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”, kemudian saksi Suharto Dina, Ketua Kelompok Tani Mekar Wangi, yang mendapatkan bantuan Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal beserta Pengadaan Pompa Air dan Perlengkapannya diminta saksi DANAR BATA Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun saksi memberikan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi I Wayan Giri Putra selaku Ketua kelompok tani Jaya Makmur, yang mendapat bantuan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Beserta Pengadaan Pompa Air Dan Perlengkapannya telah memberikan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi Sunarto Ketua kelompok Sumber Agung yang mendapatkan Pembangunan Embung memberikan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi I Made Suenda Ketua kelompok Tani Merta Sari II yang mendapat bantuan Pembangunan Embung beserta I Kadek Sura Arta selaku Bendahara hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada DANAR BATA”;
- Bahwa saksi Mursad Tuu, Ketua kelompok Tani Iloponu Desa Tanjung harapan yang mendapat bantuan Pembangunan Dam Parit beserta Hasan Aluke selaku Bendahara Kelompok Tani menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Hamid Gani, Ketua Kelompok Tani Berkat, yang mendapat bantuan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal beserta Pengadaan

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Pompa Air dan Perlengkapannya bersama Bendahara pernah memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa saksi Yusuf Pakaya, Sekretaris Kelompok Tani Cahaya Baru, yang mengerjakan Pembangunan air Tanah Dangkal milik Kelompok Tani Cahaya baru dan mengerjakan Pembangunan Dam Parit milik Kelompok Tani Mufakat yang memberikan fee kepada saksi DANAR BATA sekaligus Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yaitu Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dari Kelompok Tani Cahaya Baru dan Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dari Kelompok Tani Mufakat
- Bahwa pemberian seluruhnya berjumlah hingga sejumlah Rp. 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Kelompok Tani memberikan uang tersebut karena adanya permintaan dari Terdakwa SOFYAN HASAN S.TP.,MM., kepada para Ketua Kelompok Tani yang disampaikan pada saat rapat yang dipimpin Terdakwa SOFYAN HASAN S.TP.,MM., yang dilakukan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo sebelum pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa pada bagian lain Terdakwa SOFYAN HASAN S.TP.,MM., menyatakan tidak pernah meminta uang fee 10% sampai dengan 15 % namun Terdakwa hanya mengingatkan supaya para Kelompok Tani untuk memberikan uang rokok dan uang terimakasih untuk pembuatan SPJ;
- Bahwa pada saat para Ketua dan Bendahara Kelompok Tani melakukan pencairan Tahap III di BANK BRI, para Ketua dan Bendahara Kelompok Tani tersebut didampingi oleh saksi RUSYONO SALIKO, dimana kemudian saksi RUSYONO SALIKO menyampaikan kepada para ketua dan Bendahara Kelompok Tani agar menyerahkan Fee yang diminta oleh Terdakwa SOFYAN HASAN S.TP.,MM., dan meminta untuk menyerahkannya kepada saksi DANAR BATA, S.TP., di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, maka selanjutnya para Ketua dan Bendahara Kelompok Tani Penerima Bantuan setelah melakukan pencairan tahap III tersebut langsung menemui saksi DANAR BATA, S.TP., di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, dan para Ketua dan Bendahara Kelompok Tani tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa yang bervariasi jumlahnya seperti tersebut diatas;

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi DANAR BATA,S.TP., menerima uang tersebut lalu saksi DANAR BATA,S.TP melaporkan kepada Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP.,MM., selanjutnya Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP.,MM., meminta saksi DANAR BATA,S.TP., untuk membagikannya sebagai uang THR buat pegawai yang daftar namanya dan jumlahnya sudah ditentukan oleh Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP.,MM.;
- Bahwa selanjutnya saksi DANAR BATA,S.TP., membagikan uang tersebut sesuai dengan daftar dan jumlah yang dibuat oleh Terdakwa dan sebagian diberikan kepada Terdakwa SOFYAN HASAN, S.TP.,MM., dan sebagian untuk membayar hutang terdakwa SOFYAN HASAN, STP.,MM.,;
- Bahwa uang yang diterima saksi DANAR BATA, S.TP., dari saksi FIKRYANTO JIBU sebesar Rp. 37.550.000,00 (Tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang diterima dari para Kelompok Tani hingga sebesar Rp. 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari DAK TA 2018 yaitu dari APBN atau dari keuangan negara yang selanjutnya dibagikan kepada para pegawai sebagi THR dan sebagian untuk kepentingan Terdakwa dan saksi DANAR BATA,S.TP.;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang meminta uang dari para Ketua dan Bendahara Kelompok Tani tersebut dan meminta saksi DANAR BATA, S.TP., untuk menerima uang dari para ketua dan bendahara Kelomok Tani, demikian dengan adanya pemberian uang saksi FIKRIYANTO JIBU yang berasal dari anggaran pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal dan pengadaan pipa dan perlengkapannya, Pembangunan Embung dan Pembangunan Dam Parit TA 2018 tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp. 146.050.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengelolaan anggaran pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal, Embung dan Dam Parit TA 2018 tersebut harusnya dilakukan dengan Swakelola namun Sebagian dikerjakan oleh FIKRIYANTO JIBU;

Menimbang, bahwa barang bukti No urut 118 s/d No urut 123 merupakan barang bukti berupa mengembalikan uang, saat pemeriksaan oleh penyidik yang dari yang menerima uang berasal dari Anggaran Pembangunan

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 225 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Irigasi Air Tanah Dangkal dan Pengadaan Pipa Pembangunan lumbung dan Pembangunan Dam Parit TA 2018 yaitu : dari saksi Hanriyadi sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), saksi Ismet Lihawa Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), dari saksi Rusyono Saliko sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dari saksi Lian Ishak sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah), dari saksi Sri Wahyuni Kai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan saksi Wiya Lihawa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Bahwa pengembalian uang tersebut merupakan uang milik Negara dari Anggaran Pembayaran Irigasi Air Tanah Dangkal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, Berita Acara Persidangan serta semua surat-surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut maupun salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PT Gto tanggal 20 Nopember 2020 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum terhadap semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh dan dijadikan sebagai dasar Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa menanggapi pendapat penuntut umum dalam memori bandingnya yang menyampaikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak tepat dalam menerapkan hukum maupun dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dalam hali ini setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, Barita Acara Sidang maupun salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 20 Nopember 2020. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan Banding Penuntut Umum sebagaimana yang diutarakan dalam memori bandingnya tersebut, Hal mana didasarkan bahwa alasan banding penuntut umum tersebut

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 226 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum dengan mengkonstatir semua fakta, baik dari para saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim serta mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, Sehingga dengan demikian memori banding penuntut umum tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan menolak memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Kontra Memori Banding Terdakwa dengan demikian maka Kontra Memori Banding Terdakwa haruslah diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, setelah majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 20 November 2020, ternyata putusan majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang sejauhmana kesalahan Terdakwa, hal mana dapat dilihat dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa hasil pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal dan pengadaan pipa, Pembangunan Embung, Pembangunan Dam Parit TA. 2018 tersebut secara umum telah dapat dimanfaatkan oleh hampir seluruh Kelompok Tani, sehingga dengan demikian itu akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa berada pada aspek rendah yakni:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan atau
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya juga telah mempertimbangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 227 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi dimana dalam Pasal 5 ayat (1) Dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan :

- Kategori Keuangan Negara, atau perekonomian negara;
- Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- Rentang penjatuhan pidana;
- Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- Penjatuhan pidana, dan
- Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.146.050.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) kurang dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan pasal 6 Perma No. 1 Tahun 2020 tersebut maka kerugian keuangan negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi dalam perkara ini termasuk dalam kategori kerugian keuangan negara dalam kategori paling ringan dimana Terdakwa terbukti memperoleh hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp. 60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), diperoleh dari:

- Terdakwa minta uang kepada saksi Denar Bata dikirim melalui transfer sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
- Untuk membayar hutang pinjaman Terdakwa kepada saksi Nunung Wijayanti, SP sebesar Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah);
- Uang THR dari perolehan uang dari Anggaran pembayaran pembangunan irigasi air tanah dangkal dan pengadaan pipa tahun 2018 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dimana uang-uang tersebut diatas yang diperoleh dari hasil korupsi, menurut pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan pidana tambahan membayar ganti rugi sebesar Rp.60.500.000,-(enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang diperolehnya tersebut tidak melebihi 50 % (Lima Puluh persen);

Menimbang bahwa oleh karena Majelis hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama dalam

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 228 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusanya Nomor 7/Pid. Sus/TPK /2020/PN Gto tertanggal 20 Nopember 2020, maka terhadap putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan dengan menambah pertimbangan barang bukti No. Urut 118 s/d 123;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto, tanggal 20 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami ARI

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 229 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIWANTARA, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SIGIT HARIYANTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan AAA PUTU OKA DEWI IRIANI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD.

SIGIT HARIYANTO, S.H., M.H.

TTD.

AAA PUTU OKA DEWI IRIANI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

TTD.

ARI JIWANTARA, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

MUHAMAD ALDRIN MALIE,S.H.

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Panitera

H. SUHAIRI Z, S.H.,M.H.

	HK	HA.I	HA.II
Paraf			

Halaman 230 dari 235 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)